

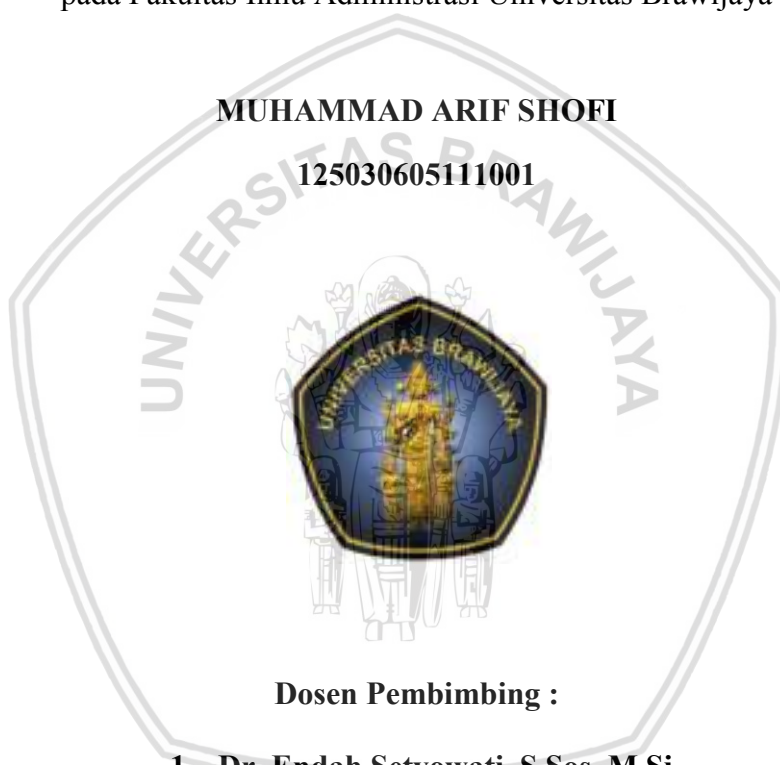
**EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA FISIK TAHUN 2017  
DI DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU KABUPATEN  
MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MUHAMMAD ARIF SHOFI**

**125030605111001**



**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si**
- 2. Dr. Ainul Hayat S.Pd, M.Si**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

## MOTTO

Surah al ghafir ayat 55

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  
بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ

55. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.





## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik  
Tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten  
Malang

Disusun oleh : Muhammad Arif Shofi

NIM : 125030605111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Malang, April 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si

NIP. 19710505 199903 2 001

Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si

NIP. 19730713 200604 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, April 2018



Muhammad Arif Shofi  
NIM. 125030605111001



## TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Mei 2018

Jam : 12:00

Skripsi atas nama : Muhammad Arif Shofi

Judul : Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana  
Fisik Tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau  
Kabupaten Malang

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota

**Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19710505 199903 2 001

**Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota

Anggota

**Dr. Irwan Noor, M.A**  
NIP. 19611024 198601 1 002

**Wike, S.Sos, M.Si, DPA**  
NIP. 19701126 200212 2 005

**Kupersembahkan Hasil Karyaku ini kepada orang tuaku tercinta Bapak Budi Suprayitno dan Ibu Maryam Hayati, serta Adik-adikku Jadid Tsania Ahsan, Dhian Tri Setiawati, Aisyah Dewi Pratiwi, Shafira Tabina Pandusari, dan keluarga besar Bazargan-Bahreys yang sangat aku sayangi.**



## RINGKASAN

Muhammad Arif Shofi, 2018, **EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FISIK TAHUN 2017 DI DESA SUMBERSEKAR, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG**. Minat Perencanaan Pembangunan, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Pembimbing (1) Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si (2) Dr. Ainul Hayat S.Pd, M.Si.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Permasalahan infrastruktur di perdesaan menjadi salah satu bidang utama yang kerap menjadi permasalahan dalam pembangunan desa. Bagaimana infrastruktur selalu menjadi faktor penghambat pembangunan perdesaan di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan suatu evaluasi program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembangunannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik dari pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya seperti alat perekam suara, buku catatan dan alat tulis. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, Kecukupan, Responsivitas, dan Ketepatan program pembangunan sarana dan prasarana. Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang turut berpengaruh dalam program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar yaitu dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung, serta anggaran dana dan kurangnya tenaga ahli perencanaan pembangunan sebagai faktor penghambat

***Kata Kunci : Evaluasi Program, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Fisik***

## SUMMARY

Muhammad Arif Shofi, 2018, **EVALUATION OF PHYSICAL FACILITIES AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM IN 2017 AT SUMBERSEKAR VILLAGE OF DAU DISTRICT OF MALANG**. Department of Planning and Development, Public Administration, Brawijaya University. Advisor (1) Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si (2) Dr. Ainul Hayat S.Pd, M.Si.

Development of village has important role because its part is inseparable and essentially has synergic relation to region and national development. Infrastructure issues that can be found in villages have become main concern for problem of village development frequently. How was the infrastructure always be inhibiting factors of village development in Indonesia. Therefore, required an evaluation of facilities and infrastructure must be applied in Sumbersekar village. The main purposes of this research are to evaluate facilities and infrastructure development program in Sumbersekar village, and analyze several factors that can affect its development.

Research methods in this thesis is descriptive research along with qualitative approach. Data references applied in this research are primary and secondary data. And for data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The research instruments used are researcher itself, interview guidebook and others supporting instruments such as voice recorder, notebook and stationary. For analyzing research data that has been collected, we used methods of Miles, Huberman and Saldana.

The results of this research are showing that facilities and infrastructure development program in Sumbersekar village has been conducted in a good way suitably with policy evaluation criteria, consists of effectivity, adequacy, responsiveness, an infrastructure program accuracy. This results also show that several factors that can affect to infrastructure development program in Sumbersekar village, there are government support, society participation as supporting factor, and budget funds. The lack of development planning expert can also affect as an inhibiting factor.

***Keywords: Evaluation of Facilities and Infrastructure Development Program***

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Evaluasi Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Tahun 2017 di Desa Sumberksekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

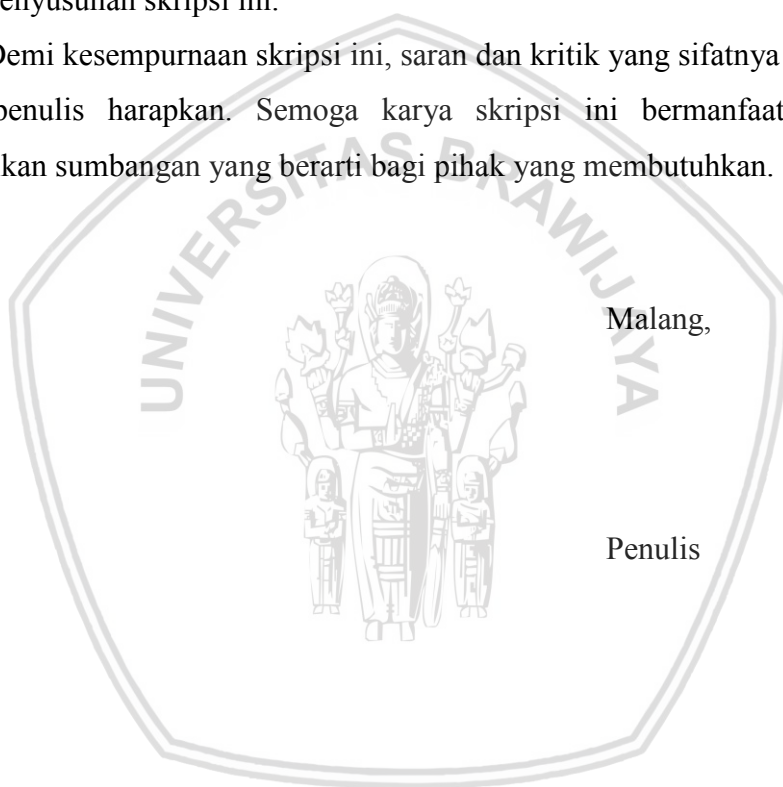
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Bapak Dr. Ainul Hayat S.Pd, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Hasan Asyari selaku Kepala Desa Sumbersekar Kabupaten Malang beserta jajarannya, serta warga desa yang telah membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

8. Semua Sahabat-sahabatku yang “di rumah Oka” dan di kos-kosan yang telah membantu memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi khususnya Perencanaan Pembangunan angkatan 2012 yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.
10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2018

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 <b>11</b>
A. Administrasi Pembangunan.....	11
B. Perencanaan Pembangunan.....	13
1. Perencanaan.....	13
2. Pembangunan.....	15
3. Perencanaan Pembangunan.....	18
4. Proses Perencanaan Pembangunan.....	19
C. Paradigma Pembangunan.....	22
D. Konsep Desa.....	26
1. Pengertian Desa .....	26
2. Karakteristik Perdesaan.....	27
3. Unsur-Unsur Desa.....	29
4. Ciri-Ciri Desa.....	30
5. Tipologi Desa.....	31
6. Pola Pemukiman.....	33
E. Pembangunan Desa.....	35
F. Pemerintah Desa.....	40
G. Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	42
1. Pengertian Sarana dan Prasarana.....	42
2. Tujuan Pembangunan Sarana dan prasarana.....	44
3. Komponen Sarana dan Prasarana.....	45
H. Evaluasi Program Sarana dan Prasarana.....	48

1. Pengertian Evaluasi.....	48
2. Sifat Evaluasi.....	50
3. Fungsi Evaluasi.....	51
4. Kriteria Evaluasi.....	52
5. Pendekatan terhadap Evaluasi.....	52
6. Muatan atau Konten Evaluasi.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Fokus Penelitian.....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Instrumen Penelitian.....	61
G. Analisis Data.....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1. Gambaran Umum Desa Sumbersekar.....	66
a. Kondisi Geografis.....	66
b. Kondisi Pemerintahan.....	68
c. Kondisi Ekonomi.....	71
d. Kondisi Sosial.....	71
1) Demografi/Kependudukan.....	75
2) Pendidikan.....	76
3) Kesehatan.....	78
e. Visi dan Misi.....	79
1) Visi.....	79
2) Misi.....	81
B. Penyajian Data.....	83
1. Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar.....	83
a. Efektivitas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	83
b. Kecukupan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	86
c. Responsivitas Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	89
d. Ketepatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	92
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar.....	95
a. Faktor Pendukung.....	95
1) Dukungan Pemerintah.....	95
2) Partisipasi Masyarakat.....	97
b. Faktor Penghambat.....	99
1) Anggaran Dana.....	99
2) Kurangnya Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan.....	102
C. Analisis Data.....	104

1. Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasana Desa Sumbersekar.....	104
a. Efektivitas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	104
b. Kecukupan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	109
c. Responsivitas Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	112
d. Ketepatan Program Pembangunan Sarana dan Praarana.....	115
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar.....	119
a. Faktor Pendukung.....	119
1) Dukungan Pemerintah.....	119
2) Partisipasi Masyarakat.....	122
b. Faktor Penghambat.....	126
1) Anggaran Dana.....	126
2) Kurangnya Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan.....	128
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>143</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Nama Perangkat Pemerintah Desa .....	69
2	Nama Bada Permusyawaratan Desa.....	70
3	Nama-Nama LPMD Desa.....	70
4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	75
5	Tamatan Sekolah Masyarakat 2016.....	76
6	Eksisting Hasil Penelitian.....	133



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Model Analisis Data Interaktif ( <i>Interactive Model</i> ).....	63
2	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.....	69
3	Pemipaan Air Bersih Dusun Precet.....	86
4	Pembangunan Jembatan tani di Dusun Krajan.....	88
5	Jembatan Tani sebelum Program Pembangunan.....	89
6	Perbaikan Akses Jalan di Dusun Semanding.....	91
7	Hasil Program Renovasi Gedung Posyandu di Dusun Semanding.....	94
8	Pembangunan Drainase di Dusun Precet.....	94



**DAFTAR LAMPIRAN****Halaman**

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian.....	143
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	145
Lampiran 3 Pedoman wawancara.....	146
Lampiran 4 Program Pembangunan Desa Sumbersekar Tahun 2017...	147



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Pembangunan menurut Siagian (1988) dalam Agus (2010) sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan menurut Tjokroamudjojo (1995) berpendapat, bahwa pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Dari dua pendapat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah proses pembaharuan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa agar suatu bangsa bisa berubah ke arah yang lebih baik.

Konteks pembangunan di Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (tercantum dalam UU Nomor. 25 Tahun 2004 tentang SPPN) yang merupakan landasan pembangunan. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetap membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diteliti lebih rinci, esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai melalui level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodifikasi pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat



pembangunan (*Centre of excellent*). Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247). Masyarakat masih di anggap oleh obyek/sasaran yang akan di bangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. (Kartasasmita, 1996 : 144).

Pemerintah telah menentukan rencana dalam pembangunan perdesaan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang kemudian disebut sebagai Musrenbangdes. Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai sarana melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam Peraturan Daerah (Perda). Keberadaan unsur masyarakat dalam musrenbang sendiri seringkali tidak terwakili dengan baik, sehingga hasil keputusan musrenbang seringkali tidak benar-benar memfasilitasi kepentingan masyarakat. Untuk itulah kiranya perlu

dilakukan riset sebelum musrenang dilaksanakan. Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai tujuan bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Daftar usulan RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu satu tahun yang akan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKP Desa membutuhkan bahan pendukung supaya rencana pembangunan desa lebih terarah dan teratur. Bahan-bahan pendukung tersebut antara lain RPJM Desa, Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), Data dan Informasi dari Kabupaten (Pagu indikatif, Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah).

Pelaksanaa pembangunan desa tidaklah mudah, hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat desa seperti faktor kemiskinan dan permasalahan lain seperti rendahnya tingkat kualitas sumberdaya manusianya. Oleh sebab itu diperlukan rencana kerja yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami masyarakat. Rencana kerja yang terbentuk diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan baik dari segi sosial maupun ekonomi masyarakat. Selain itu juga terdapat beberapa

permasalahan yang sering terdapat di perdesaan yaitu minimnya sarana maupun prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sehingga laju pertumbuhan ekonomi di perdesaan cukup lambat. Padahal jika dilihat pada sebagian besar dokumen RKP Desa yang ada di Indonesia, sebagian besar dana belanja didominasi oleh pembangunan infrastruktur desa yang memakan dana tinggi. Oleh sebab itu diperlukan rencana yang matang terutama dalam pembangunan infrastruktur yang telah menghabiskan dana banyak diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi penduduk dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berbagai bidang pembangunan yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu desa telah dilakukan oleh pemerintah seperti pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Dari beberapa bidang ini yang paling banyak menghabiskan biaya yaitu dari bidang pembangunan infrastruktur. Sebagian besar desa di berbagai wilayah di Indonesia membutuhkan dana yang besar dalam pembangunan infrastrukturnya, namun jika pembangunan infrastruktur ini dapat terencana dan terlaksana dengan baik maka hasilnya juga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beberapa contoh pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu seperti pengembangan jalan pertanian untuk mempermudah akses petani dan pembangunan pasar khusus untuk hasil pertanian beserta pengawasannya untuk pengendalian harga hasil pertanian. melihat beberapa contoh tersebut dapat menunjukkan bahwa dapat dimaklumi jika dalam bidang pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar, namun bisa sepadan dengan

hasilnya jika terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan penduduk perdesaan.

Desa Sumbersekar adalah satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Mata pencaharian warga secara umum didapat dari pertukangan, perdagangan, industri rumah tangga maupun kerajinan-kerajinan seperti anyaman tas, kerajinan keramik dan beberapa produk industri rumah tangga lainnya. Desa Sumbersekar saat ini sedang berupaya melakukan pembangunan desa, salah satunya melalui pengembangan sarana dan prasaran yang ada di Desa Sumbersekar, seperti gedung serbaguna yang berada di dalam kantor desa, pasar hewan yang ada dibelakang balai dusun Krajan dan perbaikan sarana penyedia air bersih dan sanitasi.

Mengacu pada Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbersekar Tahun 2017, tercantumkan beberapa upaya pembangunan infrastruktur lain yang memakan biaya tinggi. Biaya yang diajukan untuk pembangunan infrastruktur desa mencapai 60% dari total seluruh anggaran yang terdapat dalam RKP Tahun 2017 Desa Sumbersekar. Besarnya biaya tersebut terus terulang dari tahun ke tahun yang seharusnya dapat menambah poin dalam pertumbuhan ekonomi penduduk Desa Sumbersekar, namun dari pengamatan awal peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa pembangunan infrastruktur yang kurang diperhatikan seperti akses jalan, fasilitas kesehatan, penerangan jalan, saluran air dan fasilitas air bersih.

Melihat fakta permasalahan diatas menunjukkan bahwa dalam penentuan program pembangunan infrastruktur desa memerlukan perhatian khusus terutama untuk daerah yang lebih membutuhkan. Dalam penentuan pembangunan infrastruktur desa harus melihat kondisi dan situasi desa saat ini, apa yang menjadi kebutuhan yang dianggap lebih penting atau darurat harus lebih diutamakan. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur harus dimanfaatkan dengan baik dengan mementingkan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Jika pembangunan infrastruktur yang seharusnya didahulukan namun terus tertunda, maka dapat memperlambat perkembangan masyarakat penduduk Desa Sumbersekar baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengevaluasi penentuan program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar yang tercantum dalam RKP Tahun 2017. Peneliti ingin membandingkan apa yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan desa tersebut dengan kondisi yang sedang dialami oleh Desa Sumbersekar saat ini. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2017 di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah evaluasi program pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi rencana program pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rencana program pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Praktis**

Sebagai masukan pemerintah khususnya Perangkat desa dalam merumuskan kebijakannya berkenaan dengan peningkatan sarana prasarana di desa Sumbersekar.

## 2. Secara teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penentuan rencana program dalam pembangunan sarana dan prasarana oleh bidang pembangunan desa.
- b. Sebagai referensi tambahan dan bahan rangsangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan dan disempurnakan.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan garis besar penyusunan tugas akhir yang bertujuan untuk memudahkan secara keseluruhan isi dari tugas akhir. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang merupakan suatu rangkaian antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, menguraikan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam hal ini penulis menguraikan tentang Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori yang dicantumkan oleh penulis adalah Teori perencanaan. Teori pembangunan, Teori perencanaan pembangunan, pemebangunan desa, pemerintah desa,



pembangunan sarana prasarana, dan evaluasi program sarana dan prasarana

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan metode analisis data. Sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan data-data temuan di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus peneliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan merupakan perkembangan dari disiplin ilmu sebelumnya yaitu Administrasi Publik. Administrasi pembangunan mencakup dua makna, yaitu pertama tentang Administrasi dan yang kedua tentang Pembangunan. Administrasi adalah “keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Siagian, 1988:4). Sedangkan pembangunan memiliki makna sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*)” (Siagian, 1988:4).

Melihat beberapa penjelasan diatas, maka kesimpulan menurut Siagian (1988:5) administrasi pembangunan adalah “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”. Sedangkan menurut Riggs (1986:75) administrasi pembangunan “merujuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan”.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha oleh suatu bangsa dan negara dalam mewujudkan pertumbuhan berbagai macam aspek kehidupan yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kearah yang dianggap lebih baik.

Ruang lingkup administrasi pembangunan sebagai bagian dari disiplin ilmu Administrasi Publik memiliki dua ruang lingkup utama menurut Tjokroamidjojo (1995:14) yaitu antara lain :

1. Penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengelolaan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut sebagai Pembangunan Administrasi (*the development of administration*).
2. Merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan (pada berbagai bidang) serta pelaksanaannya secara efektif. Hal ini disebut juga sebagai Administrasi Pembangunan (*the administration of development*)

Kedua ruang lingkup Administrasi Pembangunan diatas masih memerlukan dukungan atau partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu Tjokroamidjojo (1983:31) menambahkan satu ruang lingkup yaitu pembangunan partisipasi masyarakat sebagai ruang lingkup yang ketiga. Dari berbagai hasil studi dan atau penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran sangat penting dalam pembangunan. Tujuan

pembangunan tidak akan pernah tercapai jika meninggalkan peran serta masyarakat ini. Menurut Tjokroamidjojo (1995:222-224) terdapat empat aspek penting partisipasi dalam rangka pembangunan, yaitu :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

## **B. Perencanaan Pembangunan**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan di kerjakan. Conyers and Hills (1990:3) dalam (Solekhan, 2014:57) berpendapat bahwa

*“Define Planing as a continous process which involves decisiona, or choices, about alternative ways of using available resources, with the aim of achieving particular goal at some time in the future”.*

(perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang).

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif (Bintoro, 1976:12). Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Salam, 2002:14). Pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston, 1965:26).

Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan (Tjokroamidjojo, 1995:9).

- a. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
- b. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin;
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*);
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya;
- e. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/evaluasi (*control/evaluation*).

Rozaki dkk (dalam Farkhan, 2008:42) mengemukakan bahwa selain sebagai pemilihan alternatif dan penentuan alokasi sumber daya, perencanaan setidaknya mempunyai dua makna penting yaitu:

- a. menyusun langkah-langkah untuk memastikan tujuan (hal yang hendak dicapai)
- b. membuat suatu prediksi mengenai hal-hal yang patut diduga bisa menghambat proses, hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan bagian dari suatu tindakan untuk mengantisipasi masa depan. Perencanaan sebenarnya merupakan arena partisipasi, yang sesungguhnya memegang peranan penting dalam memperlihatkan apa yang akan dilakukan dimasa depan terhadap sumberdaya yang terbatas.

Dari kedua pendapat diatas dapat di simpulkan Perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan dalam berbagai hal, setelah perencanaan maka langkah berikutnya yang harus dijalankan adalah pembangunan

## 2. Pembangunan

Menurut Siagian (dalam Suryono, 2004:21) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian yaitu:

- a. pembangunan merupakan suatu proses
- b. pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan
- c. pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan
- d. pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat *multi dimensional*
- e. proses dan kegiatan pembangunan di tujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Hal senada disampaikan oleh Tjokrowinoto (1987) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*)
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific* dan *time specific*.

Dalam kaitan dengan pembangunan yang dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, Edward Weidner (dalam Suryono, 2004:22) menyebutkan adanya 8 (delapan) tipe pembangunan, yakni:

- a. tipe ideal (*ideal type*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem
- b. tipe menghasilkan dalam jangka pendek (*short run pay off*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem
- c. tipe menghasilkan dalam jangka panjang (*long run pay off*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan sistem tetapi tidak dalam pertumbuhan
- d. tipe kegagalan (*failure*) dengan ciri adanya perencanaan, tetapi tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem;
- e. tipe dorongan lingkungan (*environmental stimulus*) dengan ciri lebih mengutamakan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan
- f. tipe pragmatis (*pragmatisme*) dengan ciri lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan kepentingan perencanaanya



- g. tipe krisis (*crisis*), dengan ciri lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem
- h. tipe masyarakat statis (*static society*), dengan ciri mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan, maupun perubahan sistem.

Menurut Suryono (2004:25) Model pembangunan yang dibutuhkan Dunia Ketiga pada saat sekarang menurut Schramm bukanlah suatu model Dunia Ketiga atau tiga benua, melainkan lebih pada satu rangkaian model nasional yang dibuat oleh bangsa yang bersangkutan yang:

- a. Didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh mengenai kebutuhan nasional
- b. Bergerak pada kecepatan berapa saja yang layak; dan
- c. Diarahkan menuju apa yang di presepsikan oleh negara dan masyarakat tersebut dengan sebagai tujuannya.

Dalam Suryono (2004:37) Pembangunan berarti upaya yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis; sedangkan kedalam mampu menciptakan keseimbangan.

Dari beberapa pendapat yang terpapar di atas kita dapat mendefinisikan bahwa, pembangunan merupakan proses perubahan kearah modernitas dan layak dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu pembangunan harus dikolaborasikan dengan perencanaan, yang disebut dengan perencanaan pembangunan.

### 3. Perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan pembangunan yang terstruktur dan merata untuk mempercepat tercapainya tujuan yang diinginkan. Waterston dalam Tjokroamidjojo (1995:12) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah “melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”. Tjokroamidjojo (1995:12) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, perencanaan pembangunan harus mampu mengarahkan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) agar bisa dikelola dan dicari alternatifnya agar sumberdaya untuk pembangunan tetap ada

Menurut Mudrajad (2012:7) perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor, antara lain:

- a. adanya kegagalan mekanisme pasar (*market failures*)
- b. ketidakpastian (*uncertainty*) masa datang
- c. untuk memberikan arah pembangunan yang jelas.

Karena ketiga faktor di atas mulai dibutuhkan untuk bangsa Indonesia, maka Indonesia perlu melakukan perencanaan pembangunan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang sistem perencanaan pembangunan



nasional UU Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dari beberapa pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang dapat mengurangi resiko dalam melaksanakan pembangunan karena, perencana lebih visioner dalam menghadapi dinamika dimasa depan. Untuk perencanaan yang lebih efektif maka perencana harus mengetahui terlebih dahulu tentang proses perencanaan pembangunan.

#### **4. Proses Perencanaan Pembangunan**

Dalam Tjokroamidjojo (1995:75) Perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Hal yang terakhir ini sering juga disebut pengendalian. Secara lebih terperinci dapat dikemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut:

##### **a. Penyusun rencana.**

Penyusun rencana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (*review before take off*) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*). Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang (masih) dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah di capai untuk

menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa di kembangkan.

- 2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Sering juga disebut sebagai *forecasting*. Dalam hal ini diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan prespektif masa depan.
- 3) Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan peranan cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana. Dilihatn dalam suatu kerangka yang lebih luas berdasar asas konsistensi dan prioritas. Pada umumnya hal ini sebaiknya dilakukan melalui penyusunan suatu kerangka menyeluruh atau kerangka makro. Dengan demikian dapat dilihat implikasi dari hubungan-hubungan antara berbagai variable dan parameter dalam bidang ekonomi dan sosial secara menyeluruh.
- 4) Identifikasi kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijakan atau *policy* mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan. Untuk bisa lebih operasionalnya rencana kegiatan-kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasar pemilihan alternatifnya yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasar *opportunity cost* dan skala prioritas. Bagi proyek-proyek pembangunan identifikasinya didukung oleh *feasibility studies* dan survei-survei pendahuluan. Penyusunan kebijakan dan program-program pembangunan tersebut pada umumnya dilakukan secara sektoral. Dengan demikian juga dilakukan penentuan secara sektoral.
- 5) Tahap terakhir daripada penyusun rencana ini adalah tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan dibidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik.

Di sini diusahakan pula penyerasian dengan perencanaan pembiayaan secara umum dari pada program-program perencanaan yang akan dilakukan yang dituangkan pada penyusunan program rencana.

b. Penyusunan program rencana.

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan jumlah dan jadwal pembiayaan serta

penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Bahkan daripada masing-masing proyek-proyek pembangunan sebagai bagian ataupun tidak dari pada program program tersebut terdahulu. Seringkali dipakai di sini suatu program kegiatan dan pembiayaan yang kongkrit daripada program-program atau proyek-proyek pembangunan tersebut dalam *project plan* yang dituang dalam *project form*. Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan dan alat evaluasi rencana yang penting. Perlu disebutkan bahwa seringkali pengesahan rencana dilakukan sebagai penutup tahap ini. Dengan demikian rencana mempunyai kedudukan legal untuk pelaksanaannya. Seringkali tahap ini perlu dibantu dengan penyusunan suatu *flow-chart*, *operation-plan* atau *network-plan*.

c. Pelaksanaan rencana.

Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usahanya berbeda dalam tahap pelaksanaan operasi perlu di pertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaanpun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana.

Tujuan daripada pengawasan adalah:

- 1) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya;
- 2) Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya;
- 3) Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Untuk ini diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik daripada pelaksanaan rencana dengan melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan. Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent review*. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil-hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri.

### C. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan menurut Surjadi (2002:1) adalah “cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat”. Dalam perkembangannya, pembangunan bangsa-bangsa di dunia mengalami pergeseran paradigma pembangunan. Menurut Tjokrowinoto yang dikutip dalam Surjadi (2002:3-5) ada tiga paradigma yang dipandang cukup dominan, yaitu antara lain :

### 1. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)

Pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang (*developing countries*), mengutamakan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan paradigma pertumbuhan dalam pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pertama berlangsung pada dasawarsa 1960-1970 dengan strategi pertumbuhan ekonomi Negara berkembang sebesar lima persen (5%) pertahun. Pada periode ini mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi, dan kerusakan lingkungan. Melihat kenyataan itu terjadilah pergeseran dari strategi pertumbuhan ekonomi menjadi strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya timbulah pemikiran paradigma baru yaitu paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*)

### 2. Paradigma Kesejahteraan (*Welfare Paradigm*)

Pada awal dasawarsa tahun 1970-an muncul pemikiran baru dalam pelaksanaan pembangunan yaitu paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*) yang berorientasi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada periode dasawarsa kedua (1970-1980) pelaksanaan pembangunan dengan strategi pertumbuhan ekonomi bergeser kepada orientasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity*

*of strategy development*) menuju industrialisasi dengan strategi pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen (6%) pertahun dengan tujuan pemerataan pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial termasuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Dalam rentang dasawarsa ini ternyata juga masih belum mampu merubah ketergantungan oleh negara berkembang terhadap Negara maju yang ditandai dengan ketergantungan investasi, bantuan, dan pinjaman luar negeri.

Penerapan paradigma kesejahteraan ini pelaksanaan pembangunannya cenderung bersifat sentralistik (*top down*) sehingga cenderung menumbuhkan hubungan ketergantungan antara rakyat dan proyek-proyek pembangunan (birokrasi pemerintah) yang dilakukan oleh pemerintah. Pada saat waktunya tiba dapat membahayakan keberlanjutan proyek pembangunan itu, oleh karena pembangunan tersebut sifatnya tidak menumbuhkan pemberdayaan (*disempowering*) rakyat agar mampu menjadi subyek dalam pembangunan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pembangunan dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadikan paradigma pertumbuhan menjadi semakin dominan. Akan tetapi keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai resiko negatif yang terjadi. Paradigma pertumbuhan ini cenderung menciptakan dampak negatif tertentu yang mengakibatkan penurunan derajat keberlanjutan pembangunan. Selanjutnya munculah gagasan baru dalam



strategi pembangunan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustained development*).

Strategi pembangunan berkelanjutan (*sustained development*) ini belajar dari pengalaman pelaksanaan pembangunan pada dasawarsa ketiga dengan munculnya konsep tata ekonomi dunia baru sebagai upaya perbaikan sosial ekonomi negara berkembang dengan strategi pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen (7%) pertahun. Pada dasawarsa ini, pusat perhatian proses pembangunan berkaitan dengan masalah kependudukan yang meningkat pesat (*population boom*), urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, partisipasi masyarakat, organisasi sosial politik, kerusakan lingkungan, dan masyarakat perdesaan. Dalam dasawarsa ini masih menghadapi masalah, yaitu tentang pelaksanaan pembangunan tidak berpadu pada pembangunan manusia, sehingga pada gilirannya berpengaruh pada timbulnya masalah ketidakadilan, kelangsungan hidup dan ketidakpaduan pembangunan.

3. Paradigma Pembangunan yang Berpusat pada Manusia (*People Centered Development Paradigm*)

Belajar dari pengalaman sebelumnya yaitu pada dasawarsa ketiga pada awal 1980-an di negara berkembang penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan pendekatan pembangunan manusia (*human development*) yang ditandai dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial di

sektor kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, pendidikan, dan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian serta pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*) supaya dapat menjadi aktor pada pembangunan sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemandirian, dan etos kerja. Fokus perhatian dari paradigma ini adalah perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*). Dominasi pemikiran dalam paradigma yang berpusat pada pembangunan manusia ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunannya yaitu informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi.

#### **D. Konsep Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Menurut Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah

tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut Maschab (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007:14) pengertian sosiologis, Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dan kehidupannya relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

## **2. Karakteristik Perdesaan**

Karakteristik perdesaan menurut Scott (1989) dalam Yudi (2010:4) menyatakan bahwa suatu daerah perdesaan telah menemukan sendiri berbagai mekanisme sosial ekonominya yang dikenal sebagai gotong-

royong (*social exchange*). Gotong royong menjadi etos subsistensi yang melahirkan norma-norma moral, seperti adanya norma resiprokal atau timbal balik dalam menikmati bantuan sosial. Secara umum, karakteristik perdesaan terbagi atas tiga, yaitu karakteristik fisik, karakteristik sosial, dan karakteristik ekonomi.

**a. Karakteristik Fisik**

Secara garis besar, daerah perdesaan memiliki ciri fisik sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dan luas tanah kecil
- 2) Tata Guna Lahan di dominasi untuk sektor pertanian
- 3) Jenis dan teknik pertanian tergantung kondisi lingkungan

**b. Karakteristik Sosial**

Corak kehidupan masyarakat di perdesaan dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga. Serta hal yang sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-motif sosial. Interaksi sosial selalu diusahakan supaya kesatuan sosial (*social unity*) tidak terganggu, konflik atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai terjadi. Prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial pada masyarakat perdesaan. Kekuatan yang mempersatukan masyarakat perdesaan itu timbul karena adanya kesamaan-kesamaan

kemasyarakatan seperti kesamaan adat kebiasaan, kesamaan tujuan dan kesamaan pengalaman.

### c. Karakteristik Ekonomi

Pada masyarakat perdesaan mata pencaharian bersifat homogen yang berada di sektor ekonomi primer, yaitu bertumpu pada bidang pertanian. Kehidupan ekonomi terutama tergantung pada usaha pengelolaan tanah untuk keperluan pertanian, peternakan, dan termasuk juga perikanan darat. Jadi, kegiatan di desa adalah mengolah alam untuk memperoleh bahan-bahan mentah baik bahan kebutuhan pangan, sandang maupun lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

### 3. Unsur-Unsur Desa

Menurut Bintarto dalam Daldjoeni (2003:55), ada tiga unsur yang membentuk sistem yang bergerak secara berhubungan dan saling terkait, yaitu :

- a. Daerah tanah yang produktif, lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis,
- b. Penduduk, jumlah penduduk, pertambahan penduduk, persebaran penduduk dan mata pencaharian penduduk,
- c. Tata Kehidupan, pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa termasuk seluk beluk kehidupan masyarakat desa

#### 4. Ciri-Ciri Desa

Sudah banyak literatur menjelaskan bahwa ciri khas desa sebagai suatu komunitas pada masa lalu selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian (Rahardjo, 1999). Menurut Roucek dan Warren dalam Shahab (2007), secara umum ciri-ciri kehidupan masyarakat perdesaan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Mempunyai sifat homogen dalam (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku),
- b. Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi yang berarti semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,
- c. Faktor geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya, keterikatan anggota keluarga dengan tanah atau desa kelahirannya,
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada kota,
- e. Jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar, dan
- f. Hubungan lebih bercorak *gemeinschaft* dan *gesellschaft*.

Menurut dirjen Bangdes (pembangunan desa) dalam Daldjoeni (2003:60), ciri – ciri wilayah desa antara lain;

- a. Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar (lahan desa lebih luas dari jumlah penduduknya, kepadatan rendah).



- b. Lapangan kerja yang dominan adalah agraris (pertanian)
- c. Hubungan antar warga amat akrab
- d. Tradisi lama masih berlaku.

## 5. Tipologi Desa

Menurut Kartohadikoesoemo (1984:18), tipologi desa terbagi atas 10 jenis yaitu :

- a. Desa pertanian adalah desa yang dibentuk dari sekumpulan manusia yang pertama berupa masyarakat pertanian. Bersama sama mereka membuka hutan belukar dan masing – masing atau secara bersamaan mereka mengolah tanah yang kosong untuk ditanami tu buh-tumbuhan yang dapat menghasilkan bahan – bahan makanan. Maka dari itu, di daerah daerah yang subur tanahnya kemudian terdapat masyarakat yang besar dan tergabung dalam ikatan desa yang kuat dan banyak penduduknya.
- b. Desa Perikanan dan Pelayaran adalah Desa yang dibentuk oleh orang-orang penangkap ikan atau oleh orang-orang pelaut yang pekerjaannya mengangkut barang-barang dagangannya ke seberang lautan. Demikian juga halnya di tepian-tepian sungai besar.
- c. Desa peternakan adalah desa yang merupakan desa dimana penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai peternak.
- d. Desa pasar (dagang) adalah desa dimana orang-orang dari berbagai jurusan dapat bertemu satu dengan yang lain untuk menjual dan membeli barang-barang yang dihasilkan masyarakat sehingga

terjadilah pasar. Di dekat pasar tersebut semakin lama tumbuh suatu masyarakat dari orang-orang yang pekerjaannya membeli dan menjual barang-barang yang dibutuhkan di tempat lain.

- e. Desa istirahat adalah suatu tempat dimana kendaraan yang berjalan dari jarak jauh biasa diberhentikan untuk memberi istirahat kepada hewan yang menarik kendaraan dan kepada orang-orang yang menjadi pengendara serta para penumpang. Dengan sendirinya maka di tempat itu berdirilah sebuah warung dimana orang dapat membeli makanan dan minuman. Lambat laun tidak saja makanan dan minuman, bahkan barang-barang akan dijual disitu.
- f. Desa tambangan adalah desa dimana tukang-tukang perahu menyebrangkan kendaraan-keandaraan dan orang-orang dari satu seberang ke seberang lain.
- g. Desa tempat keramat adalah desa yang tumbuh di dekat tempat yang dianggap keramat. Sebuah candi yang mendapat kunjungan dari masyarakat, makam yang dimuliakan, dan sebagainya, sering kali tumbuh masyarakat yang nantinya akan berkembang pula menjadi desa.
- h. Desa tambakan, setelah ada orang yang menemukan bibit dari laut yang dapat dipelihara di daratan dan dalam air asin ternyata menjadi ikan yang lezat rasanya dan diberi nama ikan bandeng, maka di tepi laut orang membuat kolam dari air laut yang di beri nama tambak untuk memelihara ikan bandeng tersebut. Dengan demikian di pesisir

tumbuh masyarakat-masyarakat tambakan dari orang-orang yang memelihara ikan bandeng

- i. Desa sumber air adalah desa yang tumbuh di dekat suatu sumber air yang besar.
- j. Desa pertambangan adalah desa yang tumbuh di dekat wilayah yang menghasilkan hasil-hasil pertambangan.

## 6. Pola Permukiman

Kondisi fisik lingkungan merupakan faktor penting dalam proses memukimi maupun produk yang berupa permukiman (Bockstael, 1996). Pola persebaran permukiman rural lebih banyak ditentukan oleh faktor fisik lingkungan dibandingkan pertimbangan-pertimbangan sosio-ekonomik semata (Knox, 2004) (Hardie, 1997). Karakteristik permukiman penduduk yang bercirikan bentuk memanjang dengan pola mengelompok (*clustered*), berkepadatan tinggi, dan proporsi bangunan permanen seimbang dengan bangunan non permanen, berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi penduduk. Terbentuknya pola persebaran permukiman tertentu dipengaruhi oleh faktor internal penghuni yang berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi penduduk, serta faktor eksternal yang didominasi oleh faktor fisik lingkungan (Yunus, 1989) (Gustafson, 1998). Pada setiap lokasi geografis tertentu memiliki kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, sehingga determinan terbentuknya pola persebaran permukiman pada masing-masing tempat juga berbeda-beda (Fajita, 1982).

Menurut Wisadirana (2004:45), pola permukiman berdasarkan tipologi masyarakat desa adalah sebagai berikut :

- a. Tipe masyarakat dengan pola permukiman tersebar, tipe masyarakat desa ini mencirikan adanya rumah-rumah bangunan tempat tinggal yang tersebar secara berjauhan satu sama lain.
- b. Tipe masyarakat desa dengan tempat permukiman yang terkumpul. Tipe permukiman dicirikan dengan adanya bangunan-bangunan rumah tinggal yang berkumpul dan berjajar di sepanjang desa, baik berupa jalan sungai maupun jalan darat. Pada tipe masyarakat desa seperti ini, rumah tinggal dibangun di atas tanah yang luas, di belakang bangunan rumah tinggal terdapat sebidang tanah yang diusahakan sebagai sumber mata pencaharian hidup.
- c. Tipe masyarakat desa dengan permukiman melingkar, tipe masyarakat desa ini dicirikan dengan rumah tempat tinggal penduduk berada di tepi jalan yang melingkar, sehingga kampung ini terlihat seperti sebuah lingkaran permukiman.

#### **E. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat perdesaan lahir dan batin. Kansil (Patton, 2005:60) mengatakan “pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat

memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan”.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Desa.

Pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan pembangunan *top down* (dari atas ke bawah) masih diperlukan, khususnya untuk program-program pembangunan yang bersifat vital atau terkait dengan kepentingan orang banyak atau yang merupakan pelayanan antar wilayah, sedangkan pendekatan *bottom-up*. Perencanaan semacam ini membuat masyarakat langsung yang menentukan apa yang direncanakan, dengan cara apa akan dilakukan dan yang paling menjadi dasarnya adalah perencanaan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri sehingga kegunaan dari pembangunan yang akan dilaksanakan akan sangat berarti dan berguna bagi kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek

itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi.



Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya.

Banyak pembahasan yang dinamis tentang pembangunan desa, dan diantara berbagai tema yang berulang-ulang dimunculkan, Bryant & White (1987:389) menyebutkan tiga hal yang penting dan menentukan tentang pembahasan tersebut, yakni :

1. Pentingnya organisasi lokal yang partisipatif dan beorientasi pada belajar dari pengalaman, yang merupakan salah satu cara pokok untuk menanggulangi kekeliruan-kekeliruan dan ketidakpastian dalam lingkungan pembangunan yang sangat tidak pasti.
2. Tidak dapat hanya dengan mengandalkan kompetensi teknokratik semata-mata yang dianggap sebagai “pemberesan kilat”. Kompetensi

tersebut dianggap menggunakan top down planning yang kecenderungannya bukannya merupakan bagian dari jalan keluar, melainkan justru merupakan bagian dari permasalahan.

3. Pentingnya menyimak kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budayanya. Kompleksitas budaya lingkungan itu merupakan bagian penting dari kehidupan lokal.

Secara khusus, Bryant & White (1987:391) menyikapi pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu : Bahwa pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (*empowerment*) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplistik.

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai

tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. Dengan demikian penekanan pada aspek “proses” memiliki arti penting. Proses belajar mengandung makna bahwa setiap kekurangan dan kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program pembangunan menjadi informasi yang penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

#### **F. Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Perubahan ke arah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintah sehari-hari; (2) semangat mengadopsi demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar dalam Undang-Undang yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat peraturan Desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan (3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjokan. Artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (*top-down*), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18, ayat 1 dikatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang.” Dari pengertian Undang-Undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah.

Perumusan secara formal desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, dikatakan bahwa desa adalah

“suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah

“kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1, ayat 12 yang menjelaskan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dengan menghormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Adapun peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur mengenai desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara substansial Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan

adat-istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggungjawab terhadap Bupati atau Walikota.

## **G. Pembangunan Sarana dan Prasarana**

### **1. Pengertian Sarana dan Prasarana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:880), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana atau yang disebut infrastruktur adalah suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai (Jayadinata: 1992). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Kodatie, 2003:9). Apabila fasilitas infrastruktur sudah diangun lebih dahulu sebelum benar-benar dibutuhkan, dan perluasan serta penyambungan pelayanan umum sudah terjamin sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka pola perkembangan masyarakat dapat dikendalikan secara efektif (Stein dalam Catanese, 1992:318).

Infrastruktur atau prasarana dan sarana diartikan sebafei fasilitas fisik suatu kota atau negara yang disebut pekerjaan umum (Grigg dalam Suripin, 2004:1). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang



Perumahan dan Pemukiman, prasarana diartikan sebagai kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*special space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberukan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi (Kodoatie, 2003:9). Sektor infrastruktur mencakup air bersih, jalan/jembatan, fasilitas komunikasi serta fasilitas sanitasi dan sampah (Nurmandi, 1999:98).

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, prasarana dan sarana didefinisikan sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyama dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam mempertahankan kehidupannya (Suripin, 2004:2). Pengelolaan sistem infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mempunyai beberapa dimensi yang harus diintegrasikan ke semua aspek

pembangunannya, salah satunya *political sustainability*, link birokrasi (pemerintah) dan masyarakat. Para pemimpin formal dan informal untuk suatu sektor tertentu dalam masyarakat lokal harus mampu menjalin komunikasi dengan struktur-struktur politik dan birokrasi (Kodoatie, 2003:173). Kualitas infrastruktur suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian negara tersebut. Semakin maju suatu negara, semakin besar pula kemampuan pemerintah membangun infrastruktur dengan dana sendiri (Kompas dalam Kodoatie, 2003:14).

## 2. Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kota sebagai suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen dengan penduduknya yang heterogen kedudukan sosialnya sebagai pemukiman identik dengan kumpulan dari perumahan yang luas dengan berbagai fasilitas lingkungan didalamnya (Daldjoeni, 1997:29). Beragamnya dinamika dan kegiatan masyarakat perdesaan, menurut Rukmana (1993:7) membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar tercipta suatu lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya dalam menjalani kegiatan hidupnya. Komarudin, (1997:92) menyatakan bahwa tujuan pembangunan prasarana pemukiman adalah:

- a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni pemukiman yang sehat dan teratur.
- b. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- c. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan pemukiman yang diperlukan serta

mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana dari pengertian diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.

### 3. Komponen Sarana dan Prasarana

Budiharjo (1993) menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan perumahan adalah sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. Pelayanan Sosial (*social services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
- b. Fasilitas Sosial (*social facilities*), seperti tempat peribadatan, persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan sebagainya.
- c. Prasarana Lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.

Prasarana dasar sendiri Dirjen Cipta karya meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan serta jaringan saluran air hujan untuk drainase dan pencegahan banjir. Senada dengan hal tersebut, (Grigg:1988) menyatakan bahwa insfrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan, gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Departemen Pekerjaan Umum didalam Pedoman

Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Permukiman Kota menyatakan bahwa prasarana dasar perkotaan adalah merupakan suatu fasilitas pelayanan prasarana lingkungan perumahan kota yang meliputi komponen: jalan lingkungan, jalan setapak, penyediaan air bersih, penhelolaan limbah/sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan tersebut diatas menurut *Organisation for Economic Cooperation dan Development* (1991:19) menyatakan bahwa prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Dari komponen prasarana tersebut, prasarana yang benar-benar dikelola oleh masyarakat pada dasarnya hanya ada 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Prasarana jalan, yaitu jalan lokar sekunder tipe I dan tipe II. Jalan lokal sekunder tipe I merupakan jalan setapak di dalam pemukiman yang berfungsi untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter sedangkan jalan lokal tipe II dengan lebar 3.5 meter berfungsi sebagai jalan kendaraan roda empat dan berada dilingkungan pemukiman. Kedua jenis jalan tersebut pembangunan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah.
- b. Prasarana drainase, yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan air yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
- c. Prasarana pembuangan sampah, yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut maka komponen sarana dan prasarana pemukiman pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam kelompok, yaitu:

- a. Komponen yang memberikan input kepada penduduk, termasuk dalam kategori ini adalah komponen prasarana air bersih dan listrik.
- b. Komponen yang mengambil output dari penduduk, termasuk dalam kelompok ini adalah prasarana drainase, pembuangan air kotor/ sanitasi dan pembuangan sampah.
- c. Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun mengambil output, yaitu meliputi prasarana jalan dan telepon.

Dengan adanya tiga komponen tersebut menyimpulkan bahwa, sarana dan prasarana bagi warga sangatlah penting, agar kualitas dari sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah desa tetap terjaga kualitasnya, maka diperlukan evaluasi sebagai alat untuk menjaga kualitas tersebut.

## **H. Evaluasi Program Sarana dan Prasarana**

### **1. Pengertian Evaluasi**

Mengikuti Dunn (2003: 608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih

berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Menurut pendapat sebagian ahli kebijakan, evaluasi dimasukkan dalam tahap akhir siklus (proses) kebijakan. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir namun masih ada tahap selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut. Sejatinya, kebijakan publik lahir mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan, namun seringkali terjadi kebijakan tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu kebijakan dan sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dilakukan evaluasi. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan ( Winarno, 2008).

Sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang



mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

## **2. Sifat Evaluasi**

Menurut Dunn (2003:608) terdapat empat sifat evaluasi yaitu :

- a. Fokus Nilai

Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

b. Interdependensi Fakta-Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan

d. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain), nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

### 3. Fungsi Evaluasi

Menurut Dunn (2003:609) evaluasi memiliki tiga fungsi, yaitu :

- a. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu (sebagai contoh, 20 persen pengurangan penyakit kronis pada tahun 1990) telah dicapai.

- b. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).
- c. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

#### 4. Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn (2003:429) terdapat empat kriteria evaluasi kebijakan diantaranya :

- a. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh hasil yang dicapai tersebut dapat memecahkan masalah.
- c. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- d. Ketepatan (*appropriateness*) berkenaan dengan seberapa besar manfaat dari hasil yang telah dicapai tersebut.

#### 5. Pendekatan terhadap Evaluasi

Menurut Dunn (2003:611) terdapat tiga macam pendekatan terhadap evaluasi, yaitu :

- a. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi-semu analisis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuisioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang diperkerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Bentuk-bentuk utama dari evaluasi semu mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauan : eksperimentasi sosial, akutansi sistem sosial, pemeriksaan sosial, dan sistesis penelitian dan praktik.
- b. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik : untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan.
- c. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode diskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan bawah, pegawai pada badan-badan lainnya, kelompok

klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target di mana kinerja nantinya akan diukur.

## 6. Muatan atau Konten Evaluasi

Menurut Wahab (2011:127), muatan studi-studi evaluasi pada umumnya memfokuskan diri pada 3 isu berikut:

- a. Efektivitas, dalam komponen studi evaluasi ini data dikumpulkan untuk mengetahui apakah proyek telah mewujudkan tujuannya, atau akan mewujudkan tujuan tersebut. Hasil akhir efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara hasil yang didapat dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Dampak, komponen ini didasarkan pada hasil akhir analisis efektivitas, namun selangkah lebih maju. Evaluasi dampak lebih menelisik apakah realisasi tujuan atau program tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan yang lebih tinggi. Dalam kepustakaan penelitian evaluasi dampak juga digunakan untuk menunjukkan relevansi atau signifikansi dari sebuah proyek atau program pembangunan.
- c. Efisiensi, selama mengevaluasi efisiensi, perhatian dipusatkan pada masukan-masukan (*inputs*) yang digunakan. Pertanyaan-pertanyaan kuncinya adalah apakah masukan-masukan yang benar telah digunakan dan apakah tidak mungkin dicapai hasil yang lebih baik dengan masukan-masukan yang sama, atau mencapai tujuan yang sama dengan masukan-masukan yang sedikit. Pengukuran efisiensi

dapat menggunakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sarana yang dipakai.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2010:11). Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dapat dijadikan perhatian dalam menguraikan secara sistematis, faktual, akurat, dan jelas.

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi, adalah sebagai berikut: Jika dilihat dari judul penelitian ini tentang evaluasi program pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, maka hal ini secara otomatis membahas masalah penentuan program pembangunan sarana dan prasarana fisik yang sesuai untuk Desa Sumbersekar. Untuk menjawab semua mengenai hal ini kiranya dapat dilakukan melalui penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan sehingga dapat menghasilkan data-data yang valid.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat penelitian dalam penelitian, dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dengan terlebih dahulu menentukan fokus penelitian, penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan mendalam. Fokus dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian (Moleong, 2011). Adapun fokus dari penelitian ini antara lain :

1. Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik di Desa Sumbersekar berdasarkan Pendapat Dunn (2003) :
  - a. Efektifitas program pembangunan sarana dan prasarana
  - b. Kecukupan program pembangunan sarana dan prasarana
  - c. Responsivitas program pembangunan sarana dan prasarana
  - d. Ketepatan program pembangunan sarana dan prasarana
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik di Desa Sumbersekar :
  - a. Pendukung
    - 1) Dukungan Pemerintah
    - 2) Partisipasi Masyarakat
  - b. Penghambat
    - 1) Anggaran Dana
    - 2) Kurangnya Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang diteliti. Sedangkan, situs penelitian merupakan letak dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan sesuai dengan fokus yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur. Sedangkan yang menjadi situs penelitian adalah Pemerintah Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

### D. Sumber Data

Dalam proses penyusunan skripsi ini agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka diperlukan adanya data-data dari berbagai sumber yang dapat membantu dalam proses penyusunan sehingga dapat memperkuat suatu analisis. Menurut Sutopo (2002:49-54) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif sumber datanya dapat berupa manusia (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, rekaman, dokumen, serta arsip. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya yang mengetahui dan berkompeten melalui wawancara, observasi (pengamatan langsung), dan penyebaran kuisioner. Dalam hal ini data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami peran penting perencanaan dana desa, antara lain

- a. Bapak H. A. selaku Kepala Desa Sumbersekar
- b. Bapak I. J. S. Kepala Seksi Pembangunan LPMD Sumbersekar
- c. Bapak Sjt Kepala Dusun Precet
- d. Bapak Sd warga RW 05 RT 01
- e. Bapak Ag warga RW 05 RT 02
- f. Bapak Sun warga RW 02 RT 03
- g. Bapak Jk warga RW 02 RT 02
- h. Bapak Bj warga RW 02 RT 01
- i. Bapak Sjno warga RW 05 RT 01

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan kepada orang lain, walaupun data yang telah dikumpulkan itu merupakan data asli. Dengan demikian data sekunder dapat diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan, peraturan adat, usulan penelitian, media massa, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang tersedia serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2020
- c. Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbersekar Tahun 2017

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan sumber informasi-informasi dan data-data dengan cara terjun langsung ke obyek yang dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian. Melalui penelitian lapangan tersebut diharapkan peneliti dapat dapat mendapatkan data-data serta informasi yang mendukung dalam proses pelaksanaan penelitian secara akurat, valid, dan benar-benar dibutuhkan dalam masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:137-138) Proses pengumpulan data-data penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu seperti berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subyek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:152). Teknik ini digunakan apabila data yang digunakan peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Desa Sumbersekar, Kepala Seksi Pembangunan LPMD Desa Sumbersekar, Kepala Dusun Precet Sumbersekar dan warga Desa Sumbersekar.

## 2. Observasi

Selain wawancara, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Observasi ini dilakukan dengan melakukan serangkaian pengamatan dengan menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam observasi ini dilakukan dengan secara fleksibel melihat kondisi objek serta lokasi yang akan diteliti, dengan menggunakan semua panca indera yang merupakan catatan-catatan yang akan digunakan untuk mencatat data-data serta informasi-informasi yang didapatkan selama melakukan penelitian di lapangan. Observasi dilakukan di seluruh wilayah pembangunan sarana dan prasarana fisik dalam lingkup Desa Sumbersekar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dimana data yang diperoleh berasal dari dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku, jurnal, makalah, buletin-buletin, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya (Arikunto, 2006:135). Dokumentasi yang dilakukan dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Peneliti menggunakan alat pengambil gambar berupa



kamera untuk melakukan dokumentasi hasil program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Menurut Arikunto (2006:12), instrumen penelitian merupakan alat penunjang atau fasilitas yang dapat digunakan oleh peneliti dalam menemukan data-data serta informasi-informasi agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik yaitu cermat, lengkap, sistematis sehingga data dan informasi dapat dan dengan mudah diolah. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Peneliti Sendiri**

Menurut Sugiyono (2010:222) dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument penelitian yang paling utama. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument utama juga perlu untuk divalidasi, meliputi validasi dalam pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang atau objek yang akan diteliti, serta kesiapan peneliti untuk memasuki atau terjun ke dalam objek peneliti yaitu Desa Sumbersekar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh seorang peneliti siap untuk melakukan penelitian dan akan terjun langsung ke wilayah Desa Sumbersekar untuk mendapatkan data terkait program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar.

##### **2. Pedoman Wawancara**

Kerangka wawancara merupakan panduan yang digunakan untuk menggali informasi-informasi yang berhubungan dan sesuai dengan fokus

dari penelitian. Kerangka wawancara yaitu suatu daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber atau informan dan daftar pertanyaan didasarkan pada masalah-masalah terkait dengan program-program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar. Digunakannya kerangka wawancara dimaksudkan agar hasil dari wawancara dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan fokus penelitian sebelumnya.

### 3. Catatan Lapangan

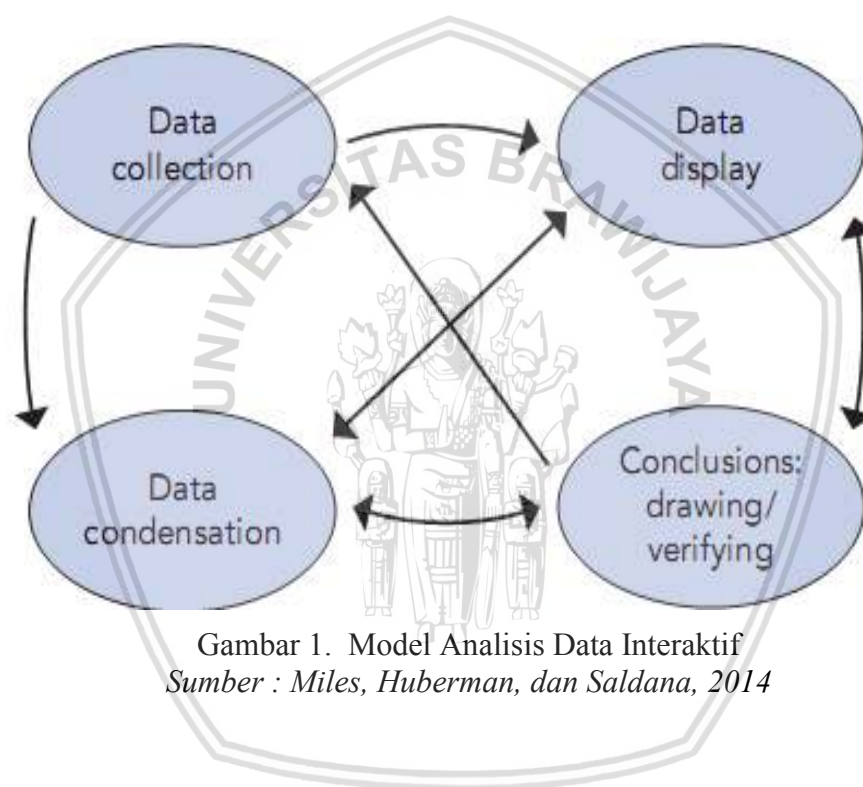
Catatan lapangan yaitu catatan penelitian dilapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan dari sumber data. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat tulis menulis untuk mendokumentasikan dan mencatat pendapat dari pihak-pihak yang bersangkutan.

## **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut maka dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian serta dasar dalam mendeskripsikan peristiwa, situasi maupun konsepsi sebagai suatu data pada objek yang sedang diteliti. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Usman dan Akbar, 2008) Dalam penelitian ini, Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Model analisis yang digunakan peneliti adalah metode pengumpulan data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman and Saldana (2014: 12-13).

Model analisis interaktif digambarkan secara sederhana melalui bagan seperti berikut:



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif  
Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana, 2014

a. *Data Collection* (pengumpulan Data)

Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan data menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi mengenai data yang relevan dengan evaluasi program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pada tahapan ini,

peneliti melakukan secara berulang-ulang agar mencapai kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yang optimal.

b. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Tahapan selanjutnya yaitu kondensasi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Data lapangan yang peneliti peroleh berdasarkan hasil observasi objek di lapangan maupun hasil wawancara peneliti dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Kesimpulannya adalah proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilih-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan peneliti. kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

c. *Data Display* (penyajian data)

Tahapan analisis data setelah kondensasi data yaitu penyajian data. Penyajian data berisikan sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasi sesuai fokus penelitian tentang evaluasi program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar tersebut berdasarkan perspektif pembangunan berbasis masyarakat selanjutnya disajikan baik dalam bentuk

tabel maupun bentuk kalimat atau uraian. Pada analisis data, data yang disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan teori induk maupun yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

d. *Conclusions: Drawing/verifying* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada. Setelah dilakukan penyajian data mengenai evaluasi program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar tersebut, langkah akhir dari rangkaian analisa data ini adalah membuat kesimpulan dari berbagai data yang didapatkan peneliti saat dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian tentang evaluasi program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau kabupaten Malang.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang di dalamnya meliputi gambaran umum Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Gambaran Umum Desa Sumbersekar

###### a. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sumbersekar terletak pada posisi  $7^{\circ} 55' 14,7''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ} 33' 59,7''$  Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 650 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Sumbersekar rata-rata mencapai 200 - 250 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember sampai Februari hingga mencapai 405,04 mm.

Secara administratif Desa Sumbersekar terletak di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan posisi wilayah yang berbatasan dengan desa tetangga. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Junrejo Kecamatan Dadaprejo Kota Batu, Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa



Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jarak tempuh Desa Sumbersekar ke Ibu kota Kecamatan Dau adalah  $\pm 3$  km, yang ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Malang adalah sekitar  $\pm 30$  km, yang ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Luas Wilayah Desa Sumbersekar adalah 527, 129 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Adapaun Luas Lahan yang diperuntukan sebagai berikut :

- Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 102 Ha.
- Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 93,5 Ha.
- Luas lahan untuk ladang / tegalan serta perkebunan adalah 192,351 Ha.
- Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 43.306 Ha.
- Luas lahan untuk tempat Pemakaman Umum 2,3 Ha.
- Luas Lahan Perkantoran 2,25 Ha,
- Luas fasilitas Sekolah 2,10 Ha,
- Luas fasilitas Olah Raga 0,8 Ha.

Wilayah Desa Sumbersekar secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam coklatan yang sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang,

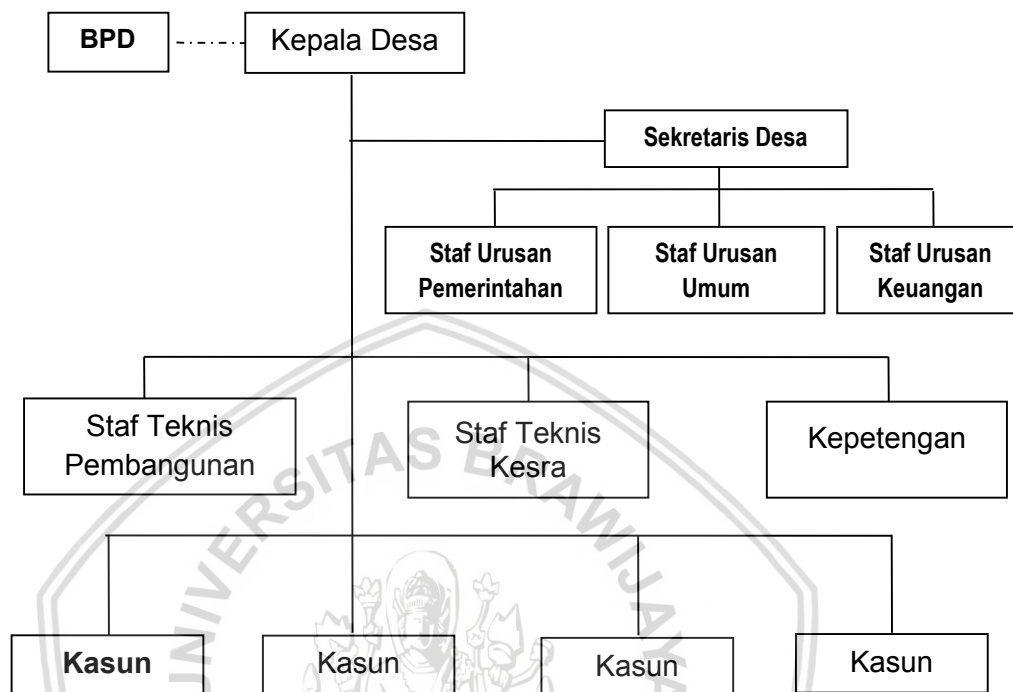
jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman handalan.

#### **b. Kondisi Pemerintahan**

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah Pemerintah Desa Sumbersekar memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk. Wilayah Desa Sumbersekar terbagi di dalam 6 (enam) Rukun Warga (RW) dan 30 (tiga puluh) Rukun Tetangga (RT) yang tergabung di dalam 4 (empat) Dusun yaitu: Dusun semanding, Dusun Krajan, Dusun Banjartengah dan Dusun Precet yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun (Kepala Dusun) menjadi sangat strategis seiring dengan banyaknya pelimpahan tugas kewilayahan Pemerintah Desa kepada Perangkat Desa ini.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Kepala Desa Sumbersekar tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

**Gambar 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa**



**Tabel 1. Nama Perangkat Pemerintah Desa**

No	Nama	Jabatan
1	Hasan Asyari	Kepala Desa
2	Rinda Perdana	Sekretaris Desa
3	Eko Sasmito Hadi	Pemerintahan
4	Rinawati	Staf Urusan Keuangan
5	Amin Anjilin	Staff Urusan Umum
6	Choirul	Seksi Pembangunan
7	Sugeng Wahyono	Seksi Kesejahteraan Rakyat / Modin
8	Sholikin	Seksi Kepetengan
9	Suyadi	Kasun Semanding
10	Budiono	Kasun Krajan
11	Karya Edhi Purwanto	Kasun Banjartengah

12	Sujito	Kasun Precet
----	--------	--------------

Sumber : RPJM Desa Sumbersekar Tahun 2015-2020

**Tabel 2. Nama Badan Permusyawaratan Desa**

No	Nama	Jabatan
1	Imam Sukardi, S. Pdi	Ketua
2	Supranoto A, S.Pd	Sekretaris
3	Hadi Susanto	Bendahara
4	Drs. Siswo	Anggota
5	Moh. Sokhah	Anggota
6	Markimun	Anggota
7	Sutrisno	Anggota

Sumber : RPJM Desa Sumbersekar Tahun 2015-2020

**Tabel 3. Nama-nama LPMD Desa**

No	Nama	Jabatan
1	Purnomo	Ketua
2	Ir. Suwono	Sekretaris
3	Widhi Okik Santoso	Bendahara
4	Suliyanto	Anggota
5	Rastam	Anggota
6	Purnomo	Anggota
7	Wijiningsih	Anggota
8	Suwaji	Anggota

Sumber : RPJM Desa Sumbersekar Tahun 2015-2020

Secara umum pelayanan Pemerintah Desa Sumbersekar kepada masyarakat sangat memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan umum dapat dikerjakan secara cepat . Begitu pula untuk

pengurusan surat - surat penting lainnya seperti akti kenal lahir dan akte kematian, sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara baik.

**c. Kondisi Ekonomi**

Secara umum perekonomian di Desa Sumbersekar berjalan lancar dan cukup baik, Jumlah pengangguran relatif rendah. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Desa bersama Pemerintah Kabupaten Malang selalu berupaya untuk memberikan bantuan melalui program daerah berupa bantuan hewan ternak, pinjaman-pinjaman lunak / bunga rendah melalui (KUR) Kredit Usaha Rakyat, melalui simpan pinjam modal usaha PNPM, Program Bantuan Sebako Raskin yang turun langsung tiap bulan, Bantuan peralatan-peralatan usaha masyarakat kecil menengah, baik itu kelompok usaha maupun yang bersifat home industri, pertumbuhan usaha menengah (UMKM) di masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan bermunculan usaha keluarga / home industri di masyarakat yang menjadikan komoditi unggulan di wilayah Desa Sumbersekar

**d. Kondisi Sosial**

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Sumbersekar, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan

pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Sumbersekar, sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat)nya adalah mereka yang secara trah / garis keturunan masih memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di pedesaan khususnya daerah Jawa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut dengan Pulung – dalam tradisi Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, semangat dan etos kerja, jujur dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala Desa. Fenomena ini juga terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Sumbersekar pada tahun 2011. Pilihan Kepala Desa bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi yakni hampir 98 %. Tercatat ada 3 (tiga) kandidat Kepala Desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan Kepala Desa. Pilihan



Kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Sumbersekar seperti acara Perayaan Desa.

Pada bulan April dan Juni 2014 masyarakat juga dilibatkan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Legislatif secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan Kepala Desa, namun hampir 93 % dari daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Sumbersekar Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir serta kembalinya kehidupan sebagaimana seperti semula. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Sumbersekar mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sumbersekar mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam

menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sumbersekar kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat sehari-hari, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Sumbersekar. Dalam hal kegiatan keagamaan misalnya agama islam suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa / Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Sumbersekar. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sumbersekar. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

### 1) Demografis / Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa pada akhir tahun 2014, jumlah penduduk Desa Sumbersekar adalah 8.348 jiwa, dengan rincian 4.162 laki-laki dan 4.186 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2.450 KK. Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Sumbersekar maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	0 s/d 4	128 Jiwa	1,53 %
2	5 s/d 9	596 Jiwa	7,14 %
3	10 s/d 14	715 Jiwa	8,56 %
4	15 s/d 19	616 Jiwa	7,38 %
5	20 s/d 24	586 Jiwa	7,02 %
6	25 s/d 29	692 Jiwa	8,29 %
7	30 s/d 34	819 Jiwa	9,81 %
8	35 s/d 39	824 Jiwa	9,87 %
9	40 s/d 44	707 Jiwa	8,47 %
10	45 s/d 49	616 Jiwa	7,38 %
11	50 s/d 54	519 Jiwa	6,22 %
12	55 s/d 59	374 Jiwa	4,48 %
13	>59	1.156 Jiwa	13,85 %

Jumlah	8.348 Jiwa	100,00 %
--------	------------	----------

Sumber : RPJM Desa Sumbersekar Tahun 2015-2020

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sumbersekar sekitar 6.299 orang atau hampir 75,45 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

## 2) Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Sumbersekar.

**Tabel 5. Tamatan Sekolah Masyarakat**

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	115	1,51 %
2	Tidak Tamat SD	994	13,08 %
3	Tamat Sekolah SD	2.734	35,97 %
4	Tamat Sekolah SMP	1.392	18,31 %
5	Tamat Sekolah SMA	1.525	20,06 %
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	841	11,06 %
<b>Jumlah Total</b>		7.601	100 %

Sumber : RPJM Desa Sumbersekar Tahun 2015-2020

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sumbersekar hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Sumbersekar tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Sumbersekar baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sumbersekar yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Sumbersekar. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat yang kurang / lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan mendasar bagi pemerintahan Desa Sumbersekar pada saat ini.

### 3) Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan adanya gejala masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Sumbersekar secara umum. Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup lumayan tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 0 orang, tuna wicara 0 orang, tuna rungu 0 orang, tuna netra 0 orang, dan lumpuh 0 orang.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2014 di Desa Sumbersekar berjumlah 1.120 orang. Sedangkan



jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 128 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas dan Polindes di Desa Sumbersekar. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif langka ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 128 balita di tahun 2014. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Sumbersekar kedepan lebih baik.

**e. Visi dan Misi**

**1) Visi**

Proses penyusunan RPJM Desa Sumbersekar sebagai pedoman program kerja Pemerintah Desa Sumbersekar ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat Desa Sumbersekar maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa 6 (enam) tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Sumbersekar. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Sumbersekar merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 6 (enam) tahun

sekali. Cita-cita masa depan Desa Sumbersekar disebut juga sebagai Visi Desa Sumbersekar.

Walaupun visi Desa Sumbersekar secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap masyarakat Desa Sumbersekar melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Sumbersekar semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2015 - 2020. Dalam momentum inilah visi Desa Sumbersekar yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di desa dan masyarakat.

Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya yang ada pada saat ini maupun ke depan. Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Sumbersekar dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Sumbersekar sebagai berikut:

**“Terbangunnya Pendidikan dan Perekonomian Desa Sumbersekar yang Kokoh, Maju, Aman, Tertib, Agamis, Demokratis, Mandiri, Religius dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sumbersekar. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sumbersekar

yang maju dalam segala bidang, sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

## 2) Misi

Hakekat Misi Desa Sumbersekar merupakan turunan dari Visi Desa Sumbersekar. Misi merupakan tujuan jangka pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sumbersekar merupakan penjabaran (**break down**) lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Sumbersekar.

Untuk meraih Visi Desa Sumbersekar seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sumbersekar sebagai berikut:

- a) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena

adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

- c) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
- d) Menata Pemerintahan Desa Sumberseki yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- f) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- g) Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
- h) Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
- i) Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malang maupun Propinsi Jawa Timur didalam melestarikan Lingkungan Hidup.
- j) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

- k) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

## **B. Penyajian Data**

Penyajian data fokus suatu kegiatan yang menyajikan dan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh selama kegiatan pengamatan lapangan sesuai dengan fokus penelitian yang disajikan secara objektif. Penyajian data fokus juga merupakan suatu temuan riil yang diperoleh di lapangan yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis. Selanjutnya data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh peneliti dari data primer yakni hasil wawancara pada beberapa narasumber dan data sekunder yang merupakan dari dokumen rencana program dan kajian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berikut ini akan dipaparkan mengenai data fokus dalam penelitian ini

### **1. Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar.**

#### **a. Efektivitas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Fokus pertama dari penelitian ini merupakan salah satu unsur evaluasi sebuah kebijakan pembangunan yaitu efektivitas dari sebuah program pembangunan. Efektivitas dari pemilihan program diperlukan dalam mengukur apakah hasil atau tujuan yang diinginkan telah tercapai atau tidak. Tingkat efektivitas menjadi unsur sangat penting ketika harus

menentukan suatu program kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

Menurut Bapak H.A. selaku Perangkat Desa Sumbersekar menyampaikan mengenai penentuan waktu dalam pemilihan program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana desa, bahwa :

“Alhamdulillah untuk semua program pembangunan sarana dan prasarana desa pada tahun ini semuanya sudah terlaksana dengan baik meskipun mengalami beberapa kendala dan miss komunikasi dengan beberapa pihak, namun pada akhirnya semua pembangunan sapras di desa ini bisa selesai, hanya menyisakan pembangunan gedung serba guna ini yang masih bertahap”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Melihat pernyataan yang telah disampaikan oleh H.A. di atas dapat dikatakan bahwa semua program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar pada Tahun 2017 telah selesai semua. Terdapat salah satu pembangunan sapras yang masih terus berjalan yaitu pembangunan gedung serba guna karena memang harus dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia dan juga untuk kepentingan program untuk bidang lain.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak I.J.S. selaku Staff Bagian Pembangunan Desa Sumbersekar menyampaikan mengenai efektivitas program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana desa, bahwa :

“semua target pembangunan sapras pada tahun ini telah mencapai target yang ditentukan, tahun ini ada lima macam sapras yang menjadi target, yaitu pembangunan gedung serbaguna, renovasi posyandu, pembangunan drainase, pembangunan pipa air dan perawatan jalan di beberapa wilayah desa”. (wawancara dilakukan



pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 09.00 di Kantor Desa Sumbersekar)

Hasil pengamatan peneliti dilapangan juga menunjukkan hal seperti yang telah disampaikan diatas, peneliti menemukan beberapa pembangunan sapras yang masih terlihat baru seperti aspal jalan, jembatan tani dan pipanisasi air bersih di Dusun Precet. Bapak Sjt selaku Perangkat Desa di Dusun Precet mengenai hal ini menyampaikan, bahwa :

“sebenarnya banyak mas kebutuhan akan pembangunan sapras precet untuk tahun ini yang sebelumnya telah terkumpul permasalahannya, namun setelah melalui musyawarah dan beberapa pertimbangan lainnya, akhirnya ada beberapa program pembangunan sapras di precet yang dapat dilakukan pada tahun ini seperti pembangunan drainase, pipa sanitasi, dan perawatan jalan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 19.00 di Rumah Bapak Sujito Dusun Precet)

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Sd selaku warga Dusun Precet yang menyampaikan, bahwa :

“Iya mas tahun kemaren itu setahu saya ada dua mas kalau tidak salah ada pembangunan saluran air di RW 5 sana, sama pemipaan sumber air bersih diatas sana itu yang sudah masuk Desa Gading Kulon, tempatnya sumber air itu agak jauh mas medannya sulit, agak masuk ke lembah, mas kalau mau kesana tidak pakai motor ini”. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 11.30, di Warung Kopi depan kampus FK UIN)



**Gambar 3. Pemipaan Air Bersih untuk Dusun Precet**  
*Sumber : Dokumen Peneliti (2017)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua program pembangunan sapras di Desa Sumbersekar telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pembangunan gedung serba guna harus melalui beberapa tahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, namun pada tahun ini tahapan pembangunan gedung serba guna tersebut telah mencapai target tahapan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya.

#### **b. Kecukupan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Fokus penelitian kedua dari penelitian ini merupakan kecukupan program pembangunan sarana dan prasarana desa, hal ini menentukan seberapa jauh suatu program tersebut mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa. Penentuan rencana program pembangunan

haruslah berdasarkan pada situasi dan kondisi desa pada saat itu, dengan begitu pemilihan program pembangunan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di desa. Bapak H.A. selaku Perangkat Desa Sumbersekar menyampaikan mengenai hal ini, bahwa :

“Sebelum proses penentuan program ini kan sudah dilakukan inventarisasi masalah yang terjadi, maka tahapan selanjutnya dibentuklah program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, seperti perbaikan jalan yang sebelumnya rusak, pembuatan pipa saluran air bersih, renovasi posyandu dan perbaikan jembatan tani. Melalui program-program tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada masing-masing bidang itu”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Melihat pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa sebelum penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana desa telah dilakukan pengumpulan permasalahan sebagai acuan untuk menentukan program pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Bapak I.J.S. selaku Staff Pembangunan desa Sumbersekar menyampaikan, bahwa :

“sebelumnya kondisi jalan itu kan rusak bahkan telah menyebabkan kecelakaan, selain itu seperti drainase di dusun Precet itukan sebelumnya juga belum ada, sehingga setiap hujan, airnya itu meluap dijalanan, maka dengan pemilihan program-program diharapkan mampu mengatasi beberapa permasalahan tersebut”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sun sebagai salah seorang warga Dusun Krajan menyampaikan, bahwa :

Jembatan yang disana itu mas baru tahun kemarin, sebelumnya itu hanya galengan kecil itu disebelahnya untuk lewat ke sawah sekarang roda 4 bisa lewat kesana, sama nambal jalan bolong itu di RT 6 sama RT 7, dulu jalanan disitu rusak dan banyak lubang

sampai sering ada orang jatuh di daerah situ, sekarang sudah bagus jalannya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 08.30 di Pasar Mbek (Kambing) Desa Sumbersekar).

Hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terpecahkan dengan beberapa pembangunan program pembangunan sapras yang ditentukan, seperti permasalahan jalan yang rusak, air yang meluap dijalanan karena belum adanya saluran drainase terutama di Dusun Precet dan juga jembatan tani yang semakin lebar sehingga lebih mudah untuk akses ke wilayah persawahan. Hal ini dapat dikatakan bahwa program pembangunan sapras di Desa Sumbersekar menjadi solusi untuk permasalahan sapras yang ada. Pemilihan program pembangunan sapras telah sesuai dengan permasalahan yang ada.



**Gambar 4. Pembangunan Jembatan Tani di Dusun Krajan**  
*Sumber : Dokumen Peneliti (2017)*





**Gambar 5. Jembatan Tani Sebelum Program Pembangunan**  
*Sumber : Dokumen Peneliti (2017)*

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber diatas dan pengamatan peneliti dilapangan, dapat dikatakan bahwa pemilihan program pembangunan sarana dan prasarana ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi. Sehingga tersusunlah rencana program pembangunan sarana dan prasarana yang berorientasi mengatasi permasalahan tersebut.

#### **c. Responsivitas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Kriteria evaluasi kebijakan selanjutnya yaitu responsivitas dari program pembangunan sarana dan prasarana. Maksud dari responsivitas ini yaitu apakah hasil kebijakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Pada penyusunan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar sebelumnya telah dilakukan pengumpulan permasalahan mencakup

sarana dan prasarana pada masing-masing dusun, tahap selanjutnya dibentuklah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bapak H.A. selaku Perangkat Desa Sumbersekar mengenai permasalahan ini menyampaikan, bahwa :

“masing-masing dusun di seluruh wilayah desa ini kan pasti memiliki permasalahan masing, nah kebijakan pembangunan sapras kita juga berdasarkan hal itu, seperti perbaikan jembatan tani itu untuk mempermudah akses petani yang sebelumnya hanya bisa kendaraan roda dua nantinya bisa untuk roda empat sehingga mempermudah ketika pengangkutan hasil panen seperti itu”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Bapak I.J.S. selaku Staff Pembangunan desa Sumbersekar mengenai hal ini menyampaikan, bahwa :

“jika dilihat dari masing-masing kelompok masyarakat dapat dikatakan telah memenuhi atau membantu kebutuhan mereka akan sapras ini, seperti jembatan tani untuk kelompok tani, saluran drainase untuk masyarakat dusun precet, perbaikan jalan dan saluran sanitasi air untuk masyarakat desa”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Bapak Jk selaku warga Dusun Semanding yang kesehariannya bekerja sebagai seorang petani menyampaikan, bahwa :

“Ya jembatan itu dulu sebelumnya juga sering dirembukkan pas musyawarah gapoktan, soalnya untuk wilayah persawahan yang disana itu dulunya hanya bisa dilewati roda dua, kalau panen mesti ngangkat sampek nglewatin jembatan itu sebelumnya, nah pas ada jembatan itu mobil pickup sudah bisa masuk, gak perlu keluar biaya lagi untuk pengangkutan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 08.30 di Pasar Mbek (Kambing) Desa Sumbersekar).



Hasil pengamatan peneliti dilapangan juga menunjukkan bahwa program pembangunan sapras pada tahun ini sebagai pemenuhan kebutuhan akan sapras bagi kelompok-kelompok tertentu. Kenyataannya manfaat dari pembangunan sapras ini juga dirasakan oleh masyarakat luas Desa Sumbersekar. Beberapa contoh mudahnya dapat dilihat seperti perbaikan jalan, meskipun lokasi perbaikannya berada di beberapa RW tertentu namun manfaatnya juga untuk masyarakat RW lain. Contoh lainnya seperti pipanisasi air bersih yang bisa lebih jauh dari sebelumnya untuk menjangkau seluruh wilayah desa.



**Gambar 6. Perbaikan Akses Jalan di Dusun Semanding**  
*Sumber : Dokumen Peneliti (2017)*

Berdasarkan kedua hasil wawancara dari narasumber dan hasil pengamatan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa seberapa jauh pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar ini dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat

ataupun bagian masyarakat desa tertentu. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar sapras saja, namun juga penduduk dari dusun lainnya bahkan masyarakat luar desa karena Desa Sumbersekar merupakan jalan alternatif antara Kabupaten Malang dan Kota Batu.

#### **d. Ketepatan Program Pembangunan Sarana dan prasarana**

Kriteria evaluasi kebijakan yang terakhir yaitu ketepatan dari program pembangunan sarana dan prasarana. Maksudnya adalah apakah program kebijakan yang dibentuk tersebut bermanfaat bagi sasaran program kebijakan atau tidak, sehingga dapat dikatakan bahwa kriteria ini mengukur sejauh mana kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat desa Sumbersekar sebagai sasaran program kebijakan. Mengenai hal ini Bapak H.A. selaku Perangkat Desa Sumbersekar menyampaikan, bahwa :

“seperti yang telah sampaikan tadi mas, tentunya program pembangunan sapras yang ada ini kan merupakan apa yang masyarakat minta, dan tentunya juga dari permasalahan yang ada sebelumnya, sehingga program-program kebijakan pembangunan sapras ini menjadi solusi untuk berbagai macam permasalahan yang diajukan terutama pada bidang sapras ini”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa manfaat dari kebijakan program sapras ini dapat dilihat dari segi pemecahan permasalahan sapras yang terjadi di Desa Sumbersekar melalui program-program pembangunan sapras yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak I.J.S. selaku Staff Pembangunan Perangkat Desa Sumbersekar mengenai manfaat dari program kebijakan sapras, bahwa :

“karena program pembangunan sapras ini yang minta adalah masyarakat sendiri tentunya masyarakat pasti mendapatkan manfaatnya mas, walaupun tidak semua program pembangunan sapras yang masyarakat minta dapat terpenuhi, sehingga ketika musyawarah desa dipilih lagi program yang lebih besar manfaatnya karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Bj selaku Warga Dusun

Semanding yang menyampaikan, bahwa :

“Itu posyandunya baru direnovasi mas tahun kemarin, sebelumnya bangunannya itu banyak yang rusak kayak atapnya itu bocor, dinding banyak yang retak, jendelanya itu kecil jadi sumpek, keponakan saya itu dulu sebelum melahirkan sering ngeluh posyandunya itu ungkep gitu katanya, tapi ternyata sudah mulai direnovasi tahun kemarin”. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret pukul 13.30 di depan Masjid Al Falah RW 06)

Hasil observasi peneliti lapangan juga menunjukkan hal serupa seperti yang disampaikan diatas, sebelumnya masyarakat mengeluhkan beberapa permasalahan sapras seperti rusaknya jalan, sumpeknnya gedung posyandu, dan meluapnya air dijalanan ketika hujan karena belum adanya drainase air. Sehingga dengan adanya pembangunan dan perbaikan sapras yang ada dapat dikatakan telah tepat sasaran karena telah mengatasi permasalahan yang ada. Pemilihan pembangunan sapras ini juga telah melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

Bapak Ag selaku warga Dusun Precet juga menambahkan mengenai manfaat sapras saluran drainase, bahwa :

“Sebelum ada saluran air itu pas habis hujan jalanan RW 5 itu becek sampai berhari-hari mas, soalnya sebelumnya gak ada saluran itu, air hujannya yang ngendap disitu gak bisa ngalir

kemana-mana, makanya dibangun saluran air itukan biar airnya bisa ngalir terutama pas hujan biar gak becek terlalu parah”. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 11.30 di Warung Kopi depan kampus FK UIN)



**Gambar 7. Hasil Program Renovasi Gedung Posyandu di Dusun Semanding**

*Sumber : Dokumen Peneliti (2017)*



**Gambar 8. Pembangunan Drainase di Dusun Precet**

*Sumber : Dokumen Peneliti (2017)*

Berdasarkan hasil pernyataan dari narasumber dan hasil observasi peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan program pembangunan sapras ini merupakan apa yang masyarakat desa minta, sehingga tentu manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat desa sendiri. Pemilihan program-program pembangunan sapras ini telah melalui kesepakatan pada musyawarah desa menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia, karena anggarannya juga perlu digunakan untuk program kebijakan yang lain seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program penyuluhan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar**

### **a. Faktor Pendukung Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar**

#### **1) Dukungan Pemerintah Desa**

Desa Sumbersekar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang telah berupaya melakukan pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai perumus kebijakan dalam memperlancar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Bapak H.A. selaku Perangkat Desa Sumbersekar mengenai hal ini menyampaikan, bahwa :

“Pemerintah Desa ini kan juga sebagai pihak yang menentukan pemilihan program-program kebijakan pembangunan desa termasuk bidang pembangunan sarana dan prasarana, nah usulan sapras baru ataupun renovasi sapras yang sedang



dibutuhkan masyarakat saat ini semua selalu kita tampung, pastinya kita selaku penyusun kebijakan tidak bisa menyetujui semuanya, sehingga pada musyawarah desa kita pilih sapras yang paling penting dan besar manfaatnya untuk masyarakat sebagai program tahun ini”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak I.J.S. selaku Staff Pembangunan Desa Sumbersekar mengenai dukungan pemerintah desa terhadap pembangunan sarana dan prasarana, bahwa :

“Kebutuhan masyarakat akan sapras ini tentu tidak akan ada habisnya mas, satu sudah terpenuhi maka akan datang kebutuhan sapras yang lainnya, maka dari itu tugas kita sebagai pembentuk program kebijakan yaitu melakukan seleksi pada berbagai macam usulan terutama akan sapras ini, melalui beberapa pertimbangan baik dari segi anggaran maupun manfaatnya sehingga terpilih program-program yang telah dilakukan tahun ini”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa juga memegang peranan penting dalam pembangunan desa termasuk bidang pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah desa sebagai perumus program kebijakan pembangunan desa melakukan seleksi terhadap usulan-usulan pembangunan sarana dari kelompok-kelompok masyarakat dalam musyawarah desa. Seleksi ini dilakukan atas pertimbangan anggaran yang tersedia dan manfaat yang lebih besar.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik. Program-program kebijakan pembangunan sarana dan



prasarana saat ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok. Menyesuaikan ketersediaan anggaran sehingga perlu memilih program pembangunan sarana dan prasarana yang lebih penting dan lebih besar manfaatnya sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana ini sangat penting sebagai pemuas kebutuhan masyarakat.

## **2) Partisipasi Masyarakat**

Langkah awal dalam meningkatkan suatu pembangunan itu diawali dengan adanya partisipasi masyarakat setempat, dan pembangunan tanpa adanya partisipasi akan terbengkalai. Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarnya ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumberdaya yang tersedia. Melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa diharapkan hasil dari pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Bapak H.A. selaku Perangkat Desa Sumbersekar menyampaikan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa terutama dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana desa, bahwa :

“dalam proses pembangunan desa daik dalam segi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat berperan sangat penting terutama dalam proses perencanaan, masyarakat desa menyampaikan aspirasi mereka melalui musyawarah desa permasalahan-permasalahan yang terjadi dan permintaan akan sapras yang mereka inginkan, dengan ini pemerintah desa dapat mengetahui dan menyusun program kebijakan yang sesuai dengan apa yang masyarakat minta sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan Bapak Perangkat Desa Sumbersekar mengenai peran pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diatas juga dikuatkan oleh yang disampaikan oleh Bapak I.J.S. selaku Staff Pembangunan Desa Sumbersekar, bahwa :

“keberhasilan pembangunan desa tidak akan dapat lepas dari peran penting masyarakat, partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan terutama dalam bidang pembangunan sapras, keluhan kesah permasalahan terkait sapras ini kan nantinya akan jadi amunisi untuk kami selaku pemerintah desa dalam merumuskan program kebijakan yang sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Berdasarkan hasil kedua wawancara pada narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Masyarakat menyampaikan permasalahan dan apa yang mereka butuhkan terutama dalam bidang sarana dan prasarana. Melalui proses tersebut, pemerintah desa dapat menyusun suatu program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Hasil pengamatan peneliti lapangan menunjukkan bahwa posisi masyarakat dalam pembangunan desa ini sangat penting karena kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah desa bertujuan untuk masyarakat desa itu sendiri. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa pada kegiatan musyawarah desa terutama Musrenbangdes sangat diperlukan. Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang layak dapat disampaikan oleh masyarakat melalui proses ini, sehingga program kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah dapat sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Beberapa penjelasan diatas telah menguatkan tentang pentingnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

## **b. Faktor Penghambat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa**

### **Sumbersekar**

#### **1) Anggaran Dana**

Dana merupakan suatu hambatan klasik dalam suatu pembangunan yang dihadapi oleh Negara Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan proses pembangunan desa yang membutuhkan suntikan dana yang cukup besar mengingat masih rendahnya kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana di desa-desa yang ada di Indonesia, juga permasalahan-permasalahan lain dalam segi non fisik sehingga membutuhkan biaya untuk pembangunan baik pembangunan dalam

segi non fisik maupun pembangunan dalam segi non fisik. Melihat beberapa pembahasan sebelumnya dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumbersekar, anggaran dana masih menjadi pertimbangan utama baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Bapak H.A. selaku Kepala Desa Sumbersekar menyampaikan mengenai permasalahan keterbatasan anggaran dalam pembangunan sarana dan prasarana ini, bahwa :

“sebenarnya memang basik dari pemilihan keseluruhan program pembangunan sapras ini selain dari segi manfaat dan kebutuhan masyarakat, namun juga dari segi anggaran sehingga kita sebagai perumus kebijakan juga sering dibingungkan ketika harus memilih pembangunan sapras yang sama-sama penting dan mendadak, sedangkan anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur ini juga terbatas karena anggaran keseluruhan tidak hanya untuk keperluan pembangunan fisik saja, karena masih ada program lain seperti pembinaan dan penyuluhan yang juga memerlukan dana tidak sedikit”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan dari Bapak Kepala Desa Sumbersekar mengenai permasalahan anggaran yang ada untuk pembangunan sarana dan prasarana desa di atas juga disampaikan oleh Bapak I.J.S. selaku Staff

Pembangunan Desa Sumbersekar, bahwa :

“benar mas, selain menjadi pertimbangan ketika tahap perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana, permasalahan anggaran ini akhirnya juga menjadi kendala ketika pelaksanaan, contohnya ketika anggaran dalam suatu program sudah ditentukan, namun ketika pelaksanaan ternyata tidak sesuai dengan harga material-material untuk bangunan, walaupun pada perencanaan anggaran sebelumnya sudah disiasati untuk dilebihkan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Melihat hasil wawancara dari kedua narasumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan anggaran masih menjadi momok dalam pembangunan perdesaan. Pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran untuk pembangunan masih menjadi acuan dalam pembentukan suatu program kebijakan. Fenomena seperti ini dapat menghambat laju pertumbuhan pembangunan di perdesaan mengingat permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang tinggal perdesaan lebih kompleks dibanding dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.

Selain beberapa pendapat tersebut, peneliti juga mendapatkan beberapa pendapat lain dari masyarakat seperti yang dikatakan oleh Bapak Sjno, bahwa :

“Itu kan saluran airnya sudah dibuatkan, kenapa tidak sekalian jalan diatasnya itu di aspal juga, kan bisa dilakukan bersamaan, jalanan disebelah saluran air itu juga rusak parah, harusnya sekalian diperbaiki juga mas, nanggung kalau hanya saluran airnya saja”. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 11.30 di Warung Kopi depan kampus FK UIN).

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti berasumsi bahwa anggaran yang ada tidak akan cukup jika juga harus melaksanakan pembangunan jalan tersebut, mengingat masih banyak bidang pembangunan atau bidang lain seperti pembinaan dan penyuluhan yang membutuhkan anggaran dana yang besar, sehingga harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan hal serupa seperti yang dijelaskan diatas. Anggaran

dana yang dimiliki oleh Desa Sumbersekar masih menjadi patokan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan terutama dalam program pembangunan sarana dan prasarana. Padahal jika dilihat, tuntutan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana ini tidaklah sedikit, namun karena harus dibagi juga dengan kebutuhan bidang lain seperti untuk penyelenggaraan pemeritahan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga anggaran yang tersisa untuk pembangunan sarana dan prasarana ini tentu tidak banyak, dan program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana harus menyesuaikan pada anggaran yang tersedia untuk bidangnya.

## **2) Kurangnya Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan**

Lahirnya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memperkuat bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Melalui kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dioperasikan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Tahunan RKP Desa. Melihat keterangan diatas menunjukkan bahwa tenaga ahli perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan oleh setiap desa dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan yang baik. Mengenai hal ini Bapak H.A. selaku Perangkat Desa Sumbersekar menyampaikan, bahwa :



“sebagian besar perangkat desa yang ada saat ini hanyalah sebatas lulusan sekolah menengah atas, jika melihat perkembangan teknologi dan informasi saat ini tentu saja masih termasuk tertinggal, maka dari itu seharusnya ada ahli perencana dalam hal ini sehingga nantinya diharapkan mampu menghasilkan program-program yang baik dan tepat baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang nanti”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Bapak I.J.S. selaku Staff Pembangunan Desa Sumbersekar mengenai kurangnya tenaga ahli perencanaan, bahwa :

“sebenarnya jika menyinggung soal perencanaannya sebenarnya kita membutuhkan orang yang ahli dalam bidang ini, apalagi saat ini sudah zamannya modern iptek berkembang sangat cepat, dan kebanyakan aparat desa yang ada saat ini hanya tamatan SMA yang hanya mengandalkan pengalaman, makanya kita butuh tenaga perencana seperti mas-mas ini dalam proses perencanaan karena memiliki ilmu yang cukup dan disinergikan dengan kami yang sudah berpengalaman sehingga menghasilkan kebijakan yang sangat akurat nantinya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Desa Sumbersekar).

Berdasarkan hasil wawancara pada kedua narasumber diatas, dapat disimpulnya bahwa kurangnya tenaga ahli dalam bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu penghambat dalam penyusunan program kebijakan desa. Hal ini disebabkan sebagian besar perangkat desa hanyalah sebatas lulusan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, meskipun terus mendapat pembinaan dari pemerintah daerah namun tetap masih membutuhkan tenaga yang lebih ahli. Maka dari itu peran pentingnya tenaga ahli

dalam bidang perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan penyusunan program kebijakan untuk desa.

Berdasarkan hasil pengamatan pemerilit dilapangan, peneliti menemukan kecenderungan yang sama untuk pemilihan program pembangunan sarana dan prasarana dengan tahun-tahun sebelumnya. Melihat pada dokumen perencanaan RKP-Des Tahun 2016 dan Tahun 2017 Desa Sumbersekar peneliti beranggapan bahwa terdapat banyak kesamaan pada pembangunan sarana dan prasarananya. Hal ini ditunjukkan dengan program-program yang cenderung hampir sama setiap tahunnya. Seperi perawatan jalan, drainase atau gorong-gorong dan sanitasi air bersih. Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwa pentingnya peran seorang tenaga ahli dalam bidang perencanaan pembangunan akan sangat dibutuhkan dalam pembangunan perdesaan.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar.**

##### **a. Efektivitas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Pengertian efektifitas dalam kamus besar bahasa indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektifitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang di

nyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektifitas adalah pengaruh yang timbul/disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang di capai dalam setiap tindakan yang dilakukan. Secara garis besar Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan atau sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Efektivitas (*effectiveness*), menurut Dunn (2003:429) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?

Melihat hasil wawancara kepada beberapa narasumber sebelumnya terlihat bahwa semua program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar semua programnya telah selesai terlaksana dan sarana dan prasarananya sudah digunakan sampai saat ini. Sedangkan pembangunan gedung serba guna harus melalui beberapa tahap

menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, namun pada tahun ini tahapan pembangunan gedung serba guna tersebut telah mencapai target tahapan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Fenomena diatas menunjukkan bahwa terselesaikannya seluruh program pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2017 di Desa Sumbersekar telah selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa program-program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar termasuk efektif sesuai dengan pernyataan Dunn (2003). Hal ini dibuktikan oleh hasil pengamatan peneliti dilapangan yang menunjukkan terdapatnya beberapa pembangunan sarana dan prasarana fisik di desa yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sumbersekar. Pemilihan program-program pembangunan sarana dan prasarana tersebut didasarkan pada berbagai macam permasalahan infrastruktur yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sebelum pemilihan program-program pembangunan sarana dan prasarana tersebut, pemerintah desa sebelumnya telah melakukan inventaris atau pengumpulan permasalahan terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di seluruh wilayah desa. Tahap selanjutnya yaitu dilakukannya musyawarah desa untuk menentukan program pembangunan sarana dan prasarana yang tepat untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tersebut. Dalam musyawarah tersebut diputuskan pemilihan program-program

pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana desa sebelumnya.

Pendapat yang tidak jauh berbeda dari pendapat Dunn (2003) mengenai efektivitas yaitu pernyataan oleh Wahab (2011), bahwa dalam komponen studi evaluasi ini data dikumpulkan untuk mengetahui apakah proyek telah mewujudkan tujuannya, atau akan mewujudkan tujuan tersebut. Hasil akhir efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara hasil yang didapat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat tersebut jika sandingkan dengan pendapat dari Dunn (2003) memiliki kemiripan yaitu sama-sama berorientasi pada tercapainya tujuan dari program pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, namun perhitungan tingkan efektivitas dari Wahab (2011) ini lebih jauh kedepan dari pada sekedar terbangunnya sarana dan prasarana yang berbentuk fisik saja, akan tetapi setelah terbangunnya sarana dan prasarana fisik tersebut juga menjadi perhitungan.

Program pembangunan sarana dan prasarna fisik di Desa Sumbersekar jika ditinjau dari efektivitas dari pendapat Wahab (2011) maka tujuan setelah terbangunnya beberapa program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa akan sarana dan prasarana fisik. Hasil yang didapat yaitu bentuk fisik dari sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar seperti jembatan tani, posyandu, drainase, jalan, dan pipanisasi air bersih. Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat Desa Sumbersekar akan sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti jembatan tani untuk akses petani menuju wilayah persawahan, pipanisasi air bersih dan saluran drainase untuk masyarakat Dusun Precet, Posyandu untuk akses kesehatan wanita hamil, dan perbaikan jalan untuk akses mobilitas seluruh masyarakat Desa Sumbersekar. Melihat penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa efektivitas yang dimaksudkan oleh Wahab (2011) juga serupa dengan efektivitas menurut pendapat Dunn (2003) dalam orientasi tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan beberapa hasil analisis peneliti diatas dengan meninjau pendapat dari Dunn (2003) dan Wahab (2011) mengenai efektivitas program pembangunan sarana dan prasarana fisik, maka dapat dikatakan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar sudah berjalan efektif sesuai dengan kedua pendapat ahli tersebut. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara sebelumnya telah dinyatakan bahwa semua program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar ini telah terselesaikan, selain itu sarana dan prasarana ini juga sudah digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Seperti akses jalan posyandu, jembatan tani dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti lapangan juga menunjukkan bahwa keberadaan beberapa hasil program pembangunan sarana dan prasarana fisik yang masih baru di beberapa tempat di wilayah Desa



Sumbersekar. Beberapa contoh sarana dan prasarana tersebut antara lain perbaikan akses jalan, jembatan tani, renovasi posyandu, pipanisasi air bersih dan saluran drainase. Maka dapat dikatakan bahwa dari hasil pengamatan peneliti dilapangan tersebut juga sesuai dengan pernyataan Dunn(2003) dan Wahab (2011) terkait efektivitas program pembangunan sarana dan prasarna fisik yang artinya semua program pembangunan telah terlaksana.

#### **b. Kecukupan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Pertanyaan tentang kecukupan tidak dapat dipecahkan dengan mengambil secara sewenang-wenang satu kriteria. Kriteria ini digunakan untuk menjawab seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber sebelumnya dan pengamatan peneliti dilapangan, dapat dikatakan bahwa pemilihan program pembangunan sarana dan prasarana ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi. Sebelum penentuan program pembangunan sarana dan prasarana, sebelumnya telah dilaksanakan inventaris atau pengumpulan masalah terkait sarana dan prasarana, setelah itu ditentukan program pembangunan sarana dan prasarana untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi. Sehingga tersusunlah rencana program pembangunan sarana dan prasarana yang berorientasi mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumbersekar sesuai dengan pernyataan dari Dunn (2003) mengenai kriteria kecukupan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil pengamatan peneliti dilapangan yang menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun telah menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Seperti program pembangunan drainase yang menjadi solusi untuk permasalahan meluapnya air terutama ketika hujan di Dusun Precet. Pembangunan jembatan tani di Krajan yang sebelumnya sangat sempit, diperlebar agar kendaraan roda empat pengangkut hasil pertanian bisa masuk ke wilayah persawahan. Selain itu juga pembangunan sarana pipanisasi air bersih yang baru karena yang lama sudah bocor. Melihat beberapa contoh tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar menjadi solusi untuk permasalahan yang ada di wilayah desa.

Pernyataan serupa dinyatakan oleh Chandler dan Plano (1988), bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Jika kita melihat penjelasan dari Dunn (2003)

mengenai sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Dalam hal ini yang dimaksud hasil tersebut adalah program kebijakan pembangunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara pendapat Dunn (2003) dengan pendapat Chandler dan Plano (1988). Contoh-contoh pembangunan yang telah peneliti paparkan sebelumnya menunjukkan hasil dari program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar, yang dapat dikatakan telah mengatasi berbagai macam masalah sesuai dengan programnya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar sesuai dengan pendapat dari Chandler dan Plano (1988) dimana suatu kebijakan untuk memecahkan masalah-masalah sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar.

Program-program pembangunan sarana dan prasarana yang ada saat ini dipilih menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dianggap sebagai solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang ada. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana ini juga ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peningkatan mutu kesehatan. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi tujuan utama dalam pemilihan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu manfaat dari pembangunan sarana dan prasarana ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecukupan dari program pembangunan sarana dan

prasarana yang disampaikan oleh Dunn di Desa Sumbersekar sudah sesuai.

**c. Responsivitas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Kriteria responsivitas merupakan kriteria penting karena sebagai kriteria yang dapat memuaskan semuakriteria. Kriteria-kriteria sebelumnya dapat dikatakan gagal jika belum menanggapi keutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Karena itu, kriteria responsivitas menanyakan pertanyaan praktis : Apakah kriteria efektifitas dan kecukupan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai dari kelompok-kelompok tertentu?

Melihat kesimpulan dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa narasumber sebelumnya menunjukkan bahwa program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumbersekar saat ini dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan beberapa kelompok tertentu. Pembangunan jembatan tani di Dusun Krajan notabeneanya ditujukan untuk kelompok tani untuk akses menuju wilayah pertanian, selain itu contoh lain dari pembangunan sarana dan prasarana lain seperti posyandu ditujukan untuk kelompok ibu-ibu dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan adanya indikasi dalam pemuasan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti pernyataan Dunn mengenai responsivitas program pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan beberapa sarana dan prasarana diatas menunjukkan sebagai pemenuhan kebutuhan dari beberapa kelompok masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumbersekar sesuai dengan pernyataan dari Dunn (2003) mengenai responsivitas program pembangunan sarana dan prasarana dimana program-program tersebut dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Permasalahan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang dijelaskan peneliti pada beberapa sub fokus sebelumnya berasal dari masing-masing individu yang memiliki keluhan yang sama dalam hal sarana dan prasarana dan akhirnya menjadi kebutuhan bersama karena kesamaan kebutuhan. Menurut Maslow (1994), pemuasana kebutuhan didorong oleh kekuatan motivasi yaitu motivasi kekurangan (*deficiency growth*) dan motivasi perkembangan (*motivation growth*). Motivasi kekurangan adalah upaya yang dilakukan manusia untuk ememnuhi kekurangan yang dialami, sedangkan motivasi perkembangan adalah motovasi yang tumbuh dari dasar diri manusia untuk mencapai suatu tujuan diri berdasarkan kapasitasnya dalam tumbuh berkembang. Pendapat dari Maslow (1994) dapat menjadi pemicu untuk pendapat dari

Dunn (2003) diatas. Berdasarkan pendapat dari Maslow dapat disimpulkan bahwa kebutuhan seseorang atau individu akan terus ada, baik untuk memenuhi kekurangan ataupun keinginan untuk berkembang, sedangkan Dunn berpendapat dalam sebuah evaluasi kebijakan terdapat kriteria mengukur sejauhmana sebuah kebijakan dapat memuaskan kebutuhan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Jika dilihat dari sudut pandang program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar, maka program pembangunan sarana dan prasarana ini merupakan sebagai pemenuhan kebutuhan baik individu maupun kelompok. Program-program tersebut dipilih atas dasar kebutuhan yang sama dari masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat karena memiliki kepentingan yang sama, seperti kelompok petani, kelompok peternak, kelompok pedagang dan kelompok-kelompok lain yang ada di Desa Sumbersekar. Jika dilihat dari pendapat Maslow (1994), maka program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar termasuk dalam motivasi kekurangan, yaitu upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kekurangan yang dialami. Peneliti telah memberikan contoh-contoh sebelumnya seperti pembangunan jembatan tani untuk kelompok tani dan pembangunan sarana dan prasarana lain. Terlihat jelas bahwa dalam program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar ada indikasi untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat.



Banyaknya kebutuhan akan sarana dan prasarana yang diajukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tidak semuanya dapat dilakukan. Pada musyawarah desa dilakukan seleksi pada program-program pembangunan yang dianggap lebih penting dan besar manfaatnya. Hal ini dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada, karena bidang lain seperti pembinaan dan penyuluhan juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit dalam realisasi program kebijakannya. Oleh sebab itu dipilihlah beberapa kebijakan program pembangunan sarana dan prasarana yang dianggap perlu didahulukan dan dilaksanakan pada tahun ini, dan lebih mengesampingkan program-program pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan menggunakan anggaran tahun depan.

#### **d. Ketepatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Kriteria terakhir yaitu Ketepatan (*appropriateness*) yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama (Dunn, 2003:438). Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Pada intinya kriteria ini mempertanyakan apakah program-program kebijakan yang dilakukan bermanfaat untuk masyarakat baik individu maupun kelompok-kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara kepada beberapa narasumber sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar merupakan apa yang masyarakat desa minta, sehingga tentu manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat desa sendiri. Pemilihan program-program pembangunan sapras ini telah melalui kesepakatan pada musyawarah desa menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia, karena anggarannya juga perlu digunakan untuk program kebijakan yang lain seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program penyuluhan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar sesuai dengan pernyataan dari Dunn (2003) mengenai ketepatan program pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan sarana-prasarana yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada telah dimanfaatkan seperti jembatan tani yang manfaatnya telah dirasakana terutama oleh kelompok tani untuk akses menuju wilayah pertanian. Hal ini dikarenakan jembatan tani yang baru dapat digunakan untuk roda empat sehingga akses untuk kendaraan pengangkut hasil panen bisa masuk menuju wilayah pertanian, tentu saja hal ini mengurangi tenaga maupun biaya yang harus dikeluarkan untuk akomodasi ketika panen berkurang. Selain itu pada sarana dan prasarana

kesehatan, program renovasi posyandu juga menunjukkan manfaat seperti yang dibahas sebelumnya, kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang nyaman juga telah terpenuhi karena posyandu saat ini sudah layak dan lebih nyaman.

Penjelasan mengenai ketepatan diatas dikuatkan oleh pendapat Winarno (2008) yang menyampaikan bahwa dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Melihat pernyataan tersebut juga serupa dengan pernyataan dari Dunn (2003) dalam menilai manfaat dari program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar. Seberapa besarkah manfaat dari program pembangunan sarana dan prasarana ini seperti yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya bahwa sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar ini memiliki manfaat dalam menunjang akses masyarakat pada kebutuhan-kebutuhan tertentu, seperti jalan untuk akses mobilitas di wilayah Desa Sumbersekar, jembatan tani untuk akses menuju persawahan, dan posyandu untuk akses kesehatan wanita mengandung. Sehingga jika ditinjau dari segi manfaat, maka pendapat dari Dunn (2003) dan Winarno (2008) ini memiliki kesamaan dalam membahas manfaat program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar.

Selain untuk masyarakat desa, beberapa program pembangunan sarana dan prasarana juga dirasakan oleh pemerintah desa, lanjutan pembangunan gedung serbaguna juga dimanfaatkan untuk rapat-rapat

atau musyawarah berskala besar. Hal ini disebabkan sebelumnya Pemerintah Desa Sumbersekar belum memiliki gedung yang memiliki kapasitas yang cukup untuk musyawarah seperti Musrenbangdes yang membutuhkan ruang yang cukup luas, sebelumnya pemerintah masih menggunakan gedung PKK dalam pelaksanaan musyawarah maupun rapat. Pembangunan gedung serbaguna ini masih belum mencapai tahap akhir karena membutuhkan anggaran untuk tahun depan dalam penyelesaiannya namun sudah dapat digunakan untuk menampung rapat atau musyawarah berskala besar. Sehingga dapat dikatakan pembangunan gedung serbaguna ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Dunn (2003) dan Wahab (2008). Masyarakat Desa Sumbersekar dapat merasakan manfaat dari program-program pembangunan sarana dan prasarana yang ada, baik individu maupun kelompok-kelompok tertentu. Selain masyarakat, pemerintah desa juga merasakan manfaat dari pembangunan sarana dan prasarana yang ada yaitu memiliki tempat untuk melaksanakan rapat maupun musyawarah tingkat desa karena sebelumnya belum memiliki gedung untuk melakukan kegiatan tersebut.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar**

### **a. Faktor Pendukung Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar**

#### **1) Dukungan Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat dua adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berpatokan pada asituasi yang sudah digambarkan sebelumnya, apabila pemerintah menjalankannya dengan sebaik mungkin, maka itu dapat mendorong masyarakat untuk turut atau ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka pembangunan tentunya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Oleh sebab itu, maka pembangunan yang direncanakan harus sesuai dengan kemauan masyarakat disamping dukungan atau

partisipasi yang dimiliki masyarakat untuk menyukseskan setiap gerak pembangunan yang akan dilaksanakan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000:13). Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid, 2000:192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Jika dilihat dari sudut pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar, maka dapat dikatakan bahwa yang pemerintah dimaksud oleh Rasyid (2000) ini tidaklain adalah Pemerintah Desa Sumbersekar.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dari kedua narasumber dan hasil pengamatan peneliti di lapangan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Sumbersekar saat ini sudah



melaksanakan fungsinya sebagai perumus kebijakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil-hasil kebijakan program pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumbersekar saat ini bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga prakarsa dari masyarakat desa sendiri yang merupakan target pembangunan. Sehingga jika dilihat dari upaya tersebut, ada indikasi dalam menyenangkan atau memnuhi kebutuhan masyarakat Desa Sumbersekar terutama dalam hal sarana dan prasarana fisik. Oleh sebab itu, program-program pembangunan sarana dan prasarana yang tecantum dalam RKP-Des Tahun 2017 yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, program-program tersebut terpilih setelah melalui beberapa pertimbangan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat.

Disisi lain Ndraha (2001:85) juga menyampaikan mengenai fungsi pemerintahan bahwa pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Pernyataan ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Rasyid (2000) terutama pada penyelenggaraan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah Desa Sumbersekar mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sampai tahap pelaksanaan pembangunan terutama perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa

Sumbersekar. Masyarakat turut aktif dalam partisipasinya melalui pengusulan program-program pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan berbagai macam keluhan terkait permasalahan sarana dan prasarana yang ada. Dengan demikian, pemerintah Desa Sumbersekar memiliki acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga dapat memilih program pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sumbersekar.

Pemerintah Desa Sumbersekar terus berupaya melakukan pembangunan maupun pengembangan pada sarana dan prasarana yang ada di desa dalam meningkatkan akses masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana tersebut, baik sarana kesehatan, pertanian, ataupun jalan desa. Penjelasan diatas menunjukkan seberapa pentingnya dukungan pemerintah desa dalam pembangunan desa terutama dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana desa. Pembangunan sarana dan prasarana desa tidak dapat berjalan jika tidak ada dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

## **2) Partisipasi Masyarakat**

Perkembangan kehidupan manusia yang makin meningkat membawa akibat berkembangnya pembangunan yang merupakan

sarana manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembangunan bersifat berhubungan satu samalain sebagai satu kesatuan. Untuk itu perlu diusahakan oleh pemerintah bagaimana mengupayakan dan mengembangkan suatu pola pembangunan daerah yang makin meluas dan melibatkan semua kekuatan yang ada dalam masyarakat, karena potensi-potensi yang ada dalam masyarakat tersebut akan merupakan salah satu kekuatan yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan di era otonomi ini. Menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2003:124) mengatakan bahwa partisipasi berarti ambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses pembangunan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi adalah merupakan peran serta warga desa baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan maupun dalam menerima hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara pada narasumber sebelumnya dan juga hasil pengamatan peneliti dilapangan, menunjukkan peran aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan proses pembangunan desa, baik dari tahap perencanaan ataupun pelaksanaan. Masyarakat Desa Sumbersekar turut aktif dalam proses perencanaan dengan cara menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar sarana dan prasarana desa dan juga mengajukan program pembangunan maupun perbaikan sarana

dan prasarana yang ada di desa. Melalui proses seperti ini dapat diketahui permasalahan seputar sarana dan prasarana desa dan juga program pembangunan yang menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Suryono (2001:124), partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Jika ditelaah lebih teliti terdapat persamaan antara pendapat Suryono (2001) dengan pendapat Hoofsteede dalam Khairuddin (2003) yakni keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pembangunan. Peneliti telah menjelaskan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat Desa Sumbersekar dalam program-program pembangunan desa terutama program pembangunan sarana dan prasarana sangat tinggi, hal ini juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai, baik dibidang ekonomi maupun kesehatan. Terlihat jelas dari penjelasan tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Suryono (2001) mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat ikut serta dalam pembangunan sekaligus menikmati hasil-hasil pembangunan.

Melihat fenomena diatas maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sumbersekar dalam pembangunan sesuai dengan pernyataan dari Hoofsteede dan Suryono mengenai

partisipasi masyarakat yang artinya turut mengambil bagian dalam suatu pembangunan. Masyarakat Desa Sumbersekar turut serta dalam proses perencanaan melalui usulan-usulan program pembangunan, hingga tahap pelaksanaan program pembangunan melalui gotong-royong. Hal ini juga disebabkan oleh tujuan dari program-program tersebut yang ditujukan untuk masyarakat sendiri sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sumbersekar sangat tinggi.

Partisipasi masyarakat Desa Sumbersekar mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan untuk meningkatkan pembangunan desa, dalam rangka mewujudkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat Desa Sumbersekar sendiri. Oleh sebab itulah, masyarakat Desa Sumbersekar harus terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan pembangunan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam evaluasi terhadap program pembangunan desa. Oleh sebab itulah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang sedang berlangsung, pemerintah desa yang mewadahi partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi diperlukan adanya motivasi yang melatarbelakanginya, yaitu adanya tuntutan atau kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri.

## **b. Faktor Penghambat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersekar**

### **1) Anggaran Dana**

Anggaran dana menjadi faktor utama dalam pembangunan terutama pembangunan di wilayah perdesaan. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan tentu memerlukan pembiayaan. Dimana anggaran merupakan faktor yang memiliki peranan cukup penting demi terlaksana suatu pembangunan. Tanpa dana maka sangat mustahil pembangunan akan terwujud, meskipun sudah di susun dengan rencana yang baik, namun bila anggaran tidak ada tentu rencana tersebut tidak akan terealisasi. Mengingat permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa lebih kompleks jika dibandingkan dengan permasalahan di kota. Penjelasan diatas menunjukkan pentingnya anggaran dalam suatu pembangunan terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perdesaan.

Melihat kesimpulan hasil wawancara sebelumnya dan hasil pengamatan peneliti dilapangan, menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran selalu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan baik pembangunan bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non-fisik. Terutama dalam pembangunan fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar, semuanya programnya menjadikan anggaran



dana sebagai acuan dalam penyusunan program, karena anggaran yang tersedia juga diperlukan untuk program kebijakan lain, seperti keperluan untuk penyelenggaraan pemerintahan, program pembinaan dan penyuluhan. Oleh sebab itu, ketersediaan anggaran saat ini dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar, meskipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai faktor penghambat, namun dikarenakan ketersediaan anggaran dana saat ini menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana, maka peneliti berasumsi bahwa pembangunan sarana dan prasarana yang ada menjadi kurang maksimal karena harus sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, keberadaan anggaran Desa Sumbersekar saat ini selama lima tahun anggaran harus digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna. Kantor Desa Sumbersekar belum memiliki ruang yang cukup untuk pelaksanaan musyawarah berskala besar seperti Musrenbangdes. Selama ini pelaksanaan musyawarah dilakukan menggunakan gedung pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) karena belum memiliki gedung serba guna seperti desa-desa lainnya. Kejadian tersebut menjadikan penggunaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lain menjadi berkurang, sehingga pembangunan sarana dan prasarana menjadi kurang maksimal

karena harus digunakan dalam pembangunan gedung serbaguna di Desa Sumbersekar.

## 2) Kurangnya Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan

Lahirnya Undang-Undang tentang Desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih baik. Meskipun desa adalah tingkat pemerintahan paling rendah di Indonesia, tapi membangun Indonesia tanpa melibatkan desa di dalamnya adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Desa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam konteks pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Subyek pembangunan desa sendiri pada dasarnya terdiri dari tiga pihak, yaitu pertama, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa serta perangkatnya, kedua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan ketiga adalah masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa adalah subyek hukum yang berperan dalam upaya pembangunan desa.

Melalui kewenangan diatas maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Tahunan RKP Desa. Dalam hal ini dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang perencanaan pembangunan agar dapat menyusun program kebijakan pembangunan yang baik. Menurut Harvey (1996) peran perencana harus mampu menciptakan kondisi untuk pertumbuhan yang seimbang dengan bersikap represi yaitu sebagai power kebijakan, kooptasi yaitu mampu membeli secara politik atau ekonomi dan integritas yaitu mampu untuk mencoba menyelaraskan. Filosofi seorang perencana adalah seorang *problem solver* yaitu seorang yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang memfokuskan pada sistem perencanaan dan proses-proses pengambilan keputusan yang tepat dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik di kota-kota, pinggiran kota, dan pedesaan.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara peneliti pada narasumber sebelumnya menunjukkan bahwa Desa Sumbersekar belum memiliki tenaga ahli perencana sendiri dalam pelaksanaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan terutama pada penyusunan RKP-Des yang menjadi agenda penting tahunan. Sebagian besar aparatur desa lulusan sebatas sekolah menengah atas

atau kejuruan, sehingga perannya dalam perencanaan kurang maksimal dan hasilnya juga sebatas program-program yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran seorang perencana dalam menyelesaikan permasalahan tentu sangat berat tetapi dengan analisa dan memilih alternatif solusi yang matang maka kebijakan yang akan diambil pun nantinya akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Peran perencana tidak hanya sebagai aktor dalam perencanaan pembangunan desa yang tidak turun langsung kepada masyarakat. Akan tetapi, pada saat ini seorang perencana haruslah terjun ke masyarakat melihat permasalahan masyarakat secara langsung dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjadi permasalahan desa sehingga permasalahan yang dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan dan sasaran perencanaan. Oleh sebab itu, diharapkan dengan hadirnya tenaga ahli perencana dapat mewujudkan perencanaan pembangunan Desa Sumbersekar yang sempurna baik pembangunan bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.

Melihat penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pentingnya tenaga ahli dalam bidang perencanaan pembangunan, maka hal ini menyinggung persoalan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur desa. Kualitas menurut Tampi (1983) dapat diartikan dengan mutu atau juga dalam bahasa praktis disamakan dengan kata bobot, nilai, dan lain-lain. Melihat pengertian tersebut dapat

diperjelas lagi dengan hal-hal menyangkut derajat, kepandaian, kecerdasan, kemampuan atau kualitas yang dilengkapi dengan keunggulan, kelebihan intelegensi, bertindak humanitas dan dengan bersifat moralis. Maka dalam pengertian teknis operasional adalah mutu dari orang-orang yang memiliki keahlian, kecerdasan, keterampilan dan berpandangan luas serta berkemampuan untuk maju dan berhasil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas manusia itu adalah suatu ukuran tentang derajat profesionalisme, derajat kecerdasan, derajat keterampilan, derajat kemauan dan kemampuan, derajat kebaikan dan kejujuran yang dipergunakan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang diimplementasikan sebagai bentuk daya juang, pengabdian dan pengalaman.

Melihat penjelasan dari Tampi (1983) terlihat betapa pentingnya SDM aparatur yang berkualitas, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Desa Sumbersekar hanyalah sebatas lulusan SMA atau SMK, sedangkan ilmu atau materi tentang perencanaan pembangunan tidak akan didapat pada tahapan pendidikan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Desa Sumbersekar membutuhkan beberapa aparatur yang memiliki kemampuan khusus atau tenaga ahli dalam bidang perencanaan pembangunan. Jika sampai kedepannya hal ini terus

terjadi, tentu saja kejadian seperti ini dapat menghambat laju pembangunan untuk kedepannya untuk Desa Sumbersekar ini. Oleh sebab itu Desa Sumbersekar membutuhkan SDM yang mahir dalam bidang perencanaan pembangunan.





**Table 6. Eksisting Hasil Penelitian**

<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Fokus</b>	<b>Temuan Penelitian</b>
1. Bagaimanakan Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?	1. Efektifitas program pembangunan sarana dan prasarana	Berdasarkan daftar program pembangunan sarana dan prasarnaa fisik yang terdapat pada RKP Tahun 2017 (hal 15) Desa Sumbersekar, Program pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2017 di Desa Sumbersekar semuanya telah terlaksana dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa, seperti posyandu, jembatan tani, jalan, sanitasi air dan lain-lain.
	2. Kecukupan pembangunan sarana dan prasarana	Sebelum program pembangunan dibentuk, sebelumnya sudah diadakan inventaris atau pengumpulan permasalahan yang ada terkait sarana dan prasarana fisik, pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2017 di Desa Sumbersekar telah mengatasi permasalahan sesuai dengan fungsi sarana dan prasarananya seperti akses jalan, jembatan tani, sanitasi air bersih, drainase dan jalan.
	3. Responsivitas program pembangunan sarana dan prasarana	Inventaris permasalahan terkait sarana dan prasarana fisik yang ada di Desa Sumbersekar dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, pedagang, PKK dan lain-lain, oleh sebab itu sarana dan prasarana yang ada saat ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok tersebut seperti jembatan tani untuk akses para petani menuju wilayah persawahan, perbaikan jalan untuk akses pedagang keseluruh wilayah desa dan lain-lain.
	4. Ketepatan program pembangunan sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana yang telah terbangun telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sumbersekar, seperti sanitasi air bersih yang bermanfaat untuk masyarakat Dusun Precet dalam mendapatkan air bersih, jembatan tani yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 untuk mengangkut hasil panen, gedung posyandu dll.

2. apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2017 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?	Faktor Pendukung	
	1. Dukungan Pemerintah	Pemerintah memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa termasuk kebutuhan akan sarana dan prasarana. Pemerintah berupaya merumuskan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan permasalahan sarana dan prasarana yang sedang dialami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat Desa Sumbersekar.
	2. Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Desa Sumbersekar memiliki tingkat partisipasi yang tinggi akan pembangunan desa, baik mulai tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan sarana dan prasarana fisik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana.
	Faktor Penghambat	
	1. Anggaran Dana	Anggaran dana masih menjadi permasalahan umum dalam pembangunan perdesaan, anggaran dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sumbersekar mencapai kurang lebih 780 juta rupiah, namun nilai anggaran dana tersebut belum dapat dikatakan cukup untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Sumbersekar, terutama Dusun Precet yang

		lokasinya berada jauh dari pusat desa dibandingkan dengan dusun lain kebutuhan akan sarana dan prasarana yang tinggi.
	2. Kurangnya Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan	Sebagian besar aparatur desa pendidikan terakhirnya hanyalah sebatas lulusan SMA atau SMK, sedangkan materi perencanaan pembangunan tidak akan didapat pada tahapan pendidikan tersebut, sehingga kurang mahir dalam proses perencanaan pembangunan, sedangkan setiap tahun terdapat agenda dalam penyusunan RKP yang menjadi rencana kerja setiap tahun yang membutuhkan SDM yang mahir dalam bidang tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang” sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program-program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar semua telah teraksana secara efektif. Pemilihan program-program pembangunan sarana dan prasarana tersebut berdasarkan atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan infrastruktur desa. Pemilihan program-program tersebut telah melalui beberapa musyawarah hingga pada tahap pelaksanaan.
2. Kecukupan program-program pembangunan sarana dan prasarana yang telah terlaksana dianggap telah mengatasi beberapa permasalahan, seperti pembangunan saluran drainase untuk mengatasi meluapnya air ke jalan, jembatan tani untuk permasalahan akses petani menuju wilayah pertanian, dan renovasi posyandu untuk akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dan memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang telah terbangun dianggap telah mengatasi permasalahan yang ada.

3. Tujuan utama pembangunan sarana dan prasarana adalah untuk menunjang kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Sumbersekar, namun disamping itu juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk beberapa kelompok masyarakat, seperti jembatan tani untuk para kelompok tani, pipanisasi air bersih untuk masyarakat dusun precet, dan posyandu untuk kelompok ibu-ibu. Maka dapat disimpulkan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumbersekar ini juga dalam rangka pemenuhan dan pemuasan kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk kelompok-kelompok masyarakat.
4. Program-program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari mudahnya akses jalan menuju ke berbagai wilayah dalam lingkup desa, akses dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, kemudahan dalam mendapatkan air bersih oleh masyarakat Dusun Precet dan akses menuju wilayah pertanian yang lebih mudah.
5. Faktor pendukung dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar yaitu diantaranya terdapatnya dukungan pemerintah melalui upayanya dalam perumusan program-program pembangunan untuk mengatasi permasalahan terkait sarana dan prasarana yang ada di masyarakat. Pemerintah Desa Sumbersekar memiliki peran penting dalam perumusan maupun pelaksanaan program-program pembangunan sarana dan prasarana Desa Sumbersekar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung dalam program pembangunan sarana dan prasaran di Desa Sumbersekar.

6. Faktor Pendukung lain selain dukungan pemerintah yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat turut berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan melalui program-program yang diusulkan kepada pemerintah maupun penyampaian permasalahan yang ada hingga tahap pelaksanaan pembangunan dengan cara gotong-royong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sumbersekar menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan sarana dan prasaran di Desa Sumbersekar.
7. Faktor penghambat pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar yaitu diantaranya beberapa kendala dalam anggaran, hal ini dikarenakan beberapa dari dana harus digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna sehingga harus ada beberapa program pembangunan sarana dan prasarana yang harus dikurangi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran saat ini masih menjadi penghambat dalam program pembangunan sarana dan prasarana desa mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah perdesaan termasuk Desa Sumbersekar
8. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang perencanaan pembangunan yang mahir mulai dari proses perencanaan pembangunan desa, proses pelaksanaan, hingga tahap evaluasi pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sumbersekar.



## B. Saran

Berdasarkan pada rumusan masalah, hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa perlu terus mengadakan inventaris atau pengumpulan permasalahan terkait sarana dan prasarana yang ada. Hal ini bertujuan untuk memperkaya data pemerintah terkait permasalahan sarana dan prasarana di wilayah Desa Sumbersekar, sehingga dapat menyusun program kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Pemerintah perlu memilah lebih teliti program-program pembangunan sarana dan prasarana yang akan disusun dan dilaksanakan. Pemerintah perlu mengetahui tingkatan permasalahan yang bersifat darurat atau biasa, sehingga dapat lebih selektif memilih program pembangunan sarana dan prasarana yang patut dilakukan tahun sekarang dan tahun yang akan datang.
3. Pemerintah desa tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan individu saja, namun juga kebutuhan dari berbagai kelompok lapisan masyarakat terutama kebutuhan akan sarana dan prasarana. Dalam hal ini pemerintah desa perlu memilih program pembangunan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan seluruh kelompok-kelompok lapisan masyarakat desa. Seperti kelompok tani, kelompok dagang, peternak dan kelompok-kelompok lain.

4. Pemerintah desa perlu melakukan seleksi lebih teliti terhadap pemilihan program-program pembangunan sarana dan prasarana yang ada, hal ini demi mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pada hanya sekedar terlaksana saja. Dari berbagai pilihan program pembangunan sarana dan prasarana yang ada, diharapkan bisa mendapatkan program pembangunan yang memiliki manfaat paling besar baik untuk individu maupun kelompok masyarakat.
5. Diharapkan pemerintah desa semakin gigih dalam berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Sumbersekar guna mendapatkan program-program pembangunan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat, karena pemerintah desa merupakan perumus kebijakan pembangunan.
6. Diharapkan masyarakat Desa Sumbersekar dapat lebih selektif dalam mengajukan program-program pembangunan sarana dan prasarana mengingat ketersediaan dana yang ada, masyarakat atau kelompok masyarakat perlu lebih selektif memilih program yang perlu dilaksanakan tahun sekarang dan program yang masih bisa ditunda untuk tahun yang akan datang.
7. Pemerintah desa perlu melakukan penimbangan yang lebih matang dalam menyusun program-program pembangunan sarana dan prasarana desa mengingat ketersediaan anggaran yang ada, baik dari segi biaya maupun manfaat yang didapat.

8. Pemerintah desa perlu memiliki tenaga ahli dalam bidang perencanaan pembangunan yang mahir dalam bidang perencanaan kebijakan, perumusan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi sehingga mendapatkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dari segi fisik maupun non fisik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar P.S dan Usman. 2008. *Pengantar Statistika*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Blogspot. 20 Mei 2015."Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang" di akses pada 30 januari 2017 dari <http://kimsumbersekar.blogspot.co.id/>
- Bryant, Coralie dan White, Loise. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Budiharjo, Eko. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Catanese, Anthony J. 1992. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- Daldjoeni, N. 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota, Puspagram Sosiologi Kta dan Ekologi sosial, Cetakan Kelima*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Daldjoeni. 2003. *Geografi Kota dan Desa untuk Mahasiswa dan Guru SMU*. Bandung : Alumni.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Grigg, Neil. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Harvey, D., (1996). *On Planning The Ideologi of Planning*. In S. Campbell & S.S. Fainstein (eds.) Malden, Massachusetts USA: Blackwell 169-175
- Jayadinata, J.T. 1992. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*. Cetakan kedua. Bandung : ITB Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1997 tentang Sarana
- Kartasmita, Ginanjar. 1994. *Pemberdayaan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cakra.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Yogyakarta: PN Balai Pustaka.
- Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Insfrastruktutr*. Semarang: Pustaka Pelajar

- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia PT Rakasindo.
- Midgley, James. 1995. *Social Development*. London : Sage Publication
- Miles, M.B; A.M. Huberman; and Saldana, johny. 2014. *Qualitative Data Analysis: An Expeded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurmandi, Ahmad. 1999. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa
- Patton, Adri. 2005. *Pemimpin Informal, Budaya Lokal Dan Pembangunan Daerah*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbersekar Tahun 2017
- Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Roucek, S.J dan Warren, L.R, 1984. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Bina Aksara
- Rukmana DW Nana, Ir, Dr Florian Steinberg, Ir Robert Vander Hoff. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES PT Pustaka.
- Scott, J.C. 1989. *Model Ekonomi Petani, Cetakan Ketiga*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. 1988. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Haji Masagung.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: 2014
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunardjo, RH Unang. 1984. *Tinjauan sepintas tentang pemerintahan desa dan kelurahan*. Bandung : Tarsito
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Surjadi. 2002. *Paradigma Pembangunan dan Kapabilitas Aparatur*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 2002.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang

- Tjkroamidjojo. Bintoro, 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2002. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Evaluasi Kritis : Reorientasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial*. Malang : UB Press.
- Wasistiono dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wisadirana. Darsono. 2004. *Sosiologi Pedesaan*. Malang : Univ. Muhammadiyah Malang.





## LAMPIRAN 1

### Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
 Telp : +62-341-553333, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1794 / UN.10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Desa  
 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang  
 Jl. Raya Sumbersekar No.108 Dau  
 Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat  
 bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi  
 mahasiswa

Nama : Muhammad Anif Shofi  
 Alamat : Jalan terusan wijaya kusuma No 7 kota malang  
 NIM : 125030605111031  
 Jurusan : Administrasi Publik  
 Konsentrasi : perencanaan pembangunan  
 Tema : Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPiP), Desa  
 Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2017  
 Lamanya : 1 ( satu ) Bulan  
 Peserta : 1 ( satu ) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 05 Desember 2017  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan Administrasi Publik



Andy Edya Wijaya, Drs, MDA, Ph.D  
 NIP. 19670217 199103 1 010

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Persewaan
2. Mahasiswa
3. ...



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN DAU  
**DESA SUMBERSEKAR**  
Jalan Raya Sumbersekar No. 108 Telp. (0641) 882822 Kode Pos 65137  
Email: sumbersekar108@gmail.com  
BUMBERSEKAR

### SURAT REKOMENDASI

Nomor : 833/130/35.07.22.2010/2017

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : HASAN ASYARI  
Jabatan : Kepala Desa Sumbersekar

Memberikan keterangan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ARIF SHOFI  
NIM : 125030605111001  
Jurusan : Administrasi Publik  
Alamat : Jalan Terusan Wijaya Kusuma No. 2 Kota Malang  
Perguruan : UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145

Yang bersangkutan akan melakukan riset / survey perencanaan pembangunan di desa sumbersekar dari Tanggal 07 Desember s.d. 07 Januari 2018 di Kantor Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Demikian surat rekomendasi ini di buat sesuai dengan keterangan dan permintaan penohon, selanjutnya di gunakan sebagaimana mestinya.

Sumbersekar, 07 Desember 2017

KEPALA DESA SUMBERSEKAR



## LAMPIRAN 2

### Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Bapak Iwan Joko Santoso selaku Kepala Seksi Pembangunan LPMD Desa Sumbersekar, 2017



Wawancara bersama Bapak Hasan Asyari selaku Kepala Desa Sumbersekar, 2017

### LAMPIRAN 3

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Perangkat Desa Sumbersekar

1. Bagaimana pembangunan sarana dan prasarana desa tahun ini? Apakah semua sudah terlaksana atau ada yg masih terkendala?
2. Apakah sapras yang telah terbangun saat ini sudah bisa dikatakan mengatasi permasalahan yang ada? Terutama permasalahan terkait sapras desa?
3. Bagaimana pendapat dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa ini? Seperti kelompok tani, kelompok pedagang, peternak dll?
4. Bagaimana manfaatnya sapras untuk warga desa sebagai sasaran pembangunan ? bisakah dikatakan bahwa sapras yang terbangun saat ini bermanfaat untuk warga?

##### Warga Desa Sumbersekar

1. Jembatan itu baru dibangun tahun ini kah pak? kok kelihatan masih baru bangunannya
2. Kenapa dengan jembatan lamanya pak?
3. Kalo sudah lama kenapa baru tahun kemarin? Lha bagaimana dari gapoktannya?
4. Ada berapa sapras pak yg dibangun di precet tahun ini?
5. Kenapa kok di RW 5 pak? Banjir atau bagaimana?
6. Posyandu itu baru tahun ini pak? Bangunannya masih bagus



**LAMPIRAN 4**  
**Program Pembangunan Desa Sumbersekar Tahun 2017**

**BAB IV**  
**RENCANA PROGRAM**  
**DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU**

**4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa**

Untuk program dan kegiatan pembangunan baik fisik maupun Non fisik untuk skala prioritas desa tahun 2017 sebagai berikut :

**4.1.1 Program Pelaksanaan Pembangunan**

- 4.1.1.1 Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Serbaguna.
- 4.1.1.2 Kegiatan Pemwalan jalan rt.03-rw.01.
- 4.1.1.3 Kegiatan Perawatan jalan rt.02-rw.01.
- 4.1.1.4 Kegiatan Perawatan jalan rt.04-rw.01.
- 4.1.1.5 Kegiatan Renovasi Tuguwatu Bw.06.
- 4.1.1.6 Kegiatan Perawatan jalan rt.04-rw.04.
- 4.1.1.7 Kegiatan Pembangunan Badan Rumah.
- 4.1.1.8 Kegiatan Perawatan jalan rt.04-rw.04.
- 4.1.1.9 Kegiatan Perawatan jalan rt.06-rw.04.
- 4.1.1.10 Kegiatan Pembangunan Monumen Dokter.
- 4.1.1.11 Kegiatan Pembag.Sarana Prasarana Pipanisasi  
Air Bersih di Dusun Preten.
- 4.1.1.12 Kegiatan Pembangunan Drainase.
- 4.1.1.13 Kegiatan Perawatan jalan rt.01-rw.03.
- 4.1.1.14 Kegiatan Pemwalan jalan rt.06-rw.03.
- 4.1.1.15 Kegiatan Perawatan jalan rt.07-rw.03.
- 4.1.1.16 Kegiatan Perawatan jalan rt.01-rw.02.
- 4.1.1.17 Kegiatan Perawatan jalan rt.02-rw.02.

4.1.1.18 Kegiatan Perawatan jalan rt.04-rw.02.

4.1.1.19 Kegiatan Pembangunan Jembatan Tani rt.02-rw.02.

4.1.1.20 Kegiatan Pembangunan Pagar Makam.

#### 4.1.2 Program Pembinaan Kemasyarakatan.

4.1.2.1 Kegiatan Keamanan & Ketertiban.

4.1.2.2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

4.1.2.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK).

4.1.2.4 Kegiatan Pembinaan Keamian Sosial Budaya.

4.1.2.5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.

#### 4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat

4.1.3.1 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

4.1.3.2 Kegiatan Pengelolaan Produk Usaha Pertanian.

4.1.3.3 Kegiatan Pemantapan & Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat & Koperasi.

4.1.3.4 Kegiatan Penyusunan Profil Desa/ Data Desa/ Aset Desa.

4.1.3.5 Kegiatan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa & Lembaga Adat.

4.1.3.6 Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa Yang berketerampilan.

4.1.3.7 Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan.

4.1.3.8 Kegiatan Pelatihan Kerja & Ketrampilan Bagi Masyarakat Desa.

4.1.3.9 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PRB.